

YOGAS ANDI
PRIMA_18.1.02.01.0010
by Rj Jj

Submission date: 10-Feb-2023 04:44AM (UTC-0500)

Submission ID: 2010809738

File name: YOGAS_ANDI_PRIMA._SKRIPSI_FULL_TTD.pdf (2.35M)

Word count: 28244

Character count: 164971

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri



OLEH :

YOGAS ANDI PRIMA
NPM : 18.1.02.01.0010

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2023**

Skripsi Oleh :

YOGAS ANDI PRIMA

18.102.01.0010

Judul :

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2021**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal 16 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Faisol, S.Pd., M.M.
NIDN. 0712046903

Pembimbing II



Erna Puspita, M.Ak.
NIDN. 0711128803

Skripsi Oleh :

YOGAS ANDI PRIMA

18.102.01.0010

Judul :

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2021**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri

Pada tanggal: 16 Januari 2023

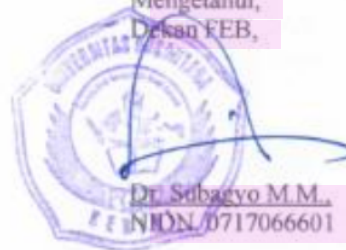
Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dr. Faisol, M.M.
2. Penguji I : Diah Nurdiwaty, M.SA.
3. Penguji II : Erna Puspita, M.Ak.



Mengetahui,
Dekan FEB,



Dr. Subagyo M.M.,
NIDN/0717066601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : YOGAS ANDI PRIMA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tgl. lahir : Nganjuk/ 30 Juni 1999

NPM : 18.102.01.0010

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri,

Yang Menyatakan

Yogas Andi Prima
NPM 18.102.01.0010

ABSTRAK

Yogas Andi Prima. ²⁵ Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2021. Skripsi, Akuntansi, FEB UNP Kediri, 2022.

²² Kata Kunci: Rasio Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten/Kota, Jawa Timur

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pentingnya pengelolaan sumber dana yang diterima pemerintah baik kabupaten/kota baik dari penghasilan pajak maupun dari pemerintah pusat agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemulihan ekonomi Covid-19 yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur masih berada di bawah rata-rata nilai IPM Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menganalisa apakah kinerja keuangan yang diprosikan dengan tingkat rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Jawa Timur selama periode 2019-2021. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi adalah kabupaten dan kota di Jawa Timur selama periode 2019-2021 sejumlah 29 kabupaten dan 9 kota yang diambil secara *total sampling*. Teknik analisis menggunakan regresi data panel dalam mengolah data *times series* dan *cross section* selama periode pengamatan 2019-2021. Data yang dikumpulkan akan dilakukan analisis model estimasi regresi data panel dan uji prasyarat klasik guna penentuan model estimasi regresi data panel yang terbaik. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan model estimasi yang memenuhi uji prasyarat adalah *fixed effect model* yang membuktikan bahwa, secara parsial tingkat rasio efektivitas PAD, tingkat rasio efisiensi keuangan daerah dan pertumbuhan PAD tidak mampu berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tetapi, secara simultan tingkat rasio efektivitas PAD, tingkat rasio efisiensi keuangan daerah, dan pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya dan memberikan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan seminar proposal dengan baik. Penyusunan seminar proposal ini merupakan bagian dari rencana penelitian menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang merupakan salah satu untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia.
2. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, adikku dan keluarga tercinta yang tak pernah lupa memberikan semangat, serta do'a restu untuk meraih gelar sarjana di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Bapak Dr. Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor UNP Kediri Yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Subagyo M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Bapak Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Bapak Dr. Faisol, M.M. dan Erna Puspita, M.Ak. selaku pembimbing yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan, waktu dan petunjuk kepada saya dalam penyusunan proposal Skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penyusunan seminar proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini.

Kediri, 30 Januari 2023
Penulis

Yogas Andi Prima
18.1.02.01.0010

Motto:

*Barang siapa ingin mencapai masalah-masalah dunia,
capailah dengan ilmu.*

*Barang siapa ingin mencapai masalah-masalah akhirat,
capailah dengan ilmu.*

*Dan barang siapa ingin mencapai keduanya,
capailah dengan ilmu.*

(Hadist Nabi)

Kupersembahkan karya ini buat:

Seluruh keluargaku tercinta.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Indeks Pembangunan Manusia	12
2. Laporan Keuangan	17
3. Kinerja Keuangan Daerah	18
B. Kajian Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Berpikir	33
D. Kerangka Konseptual	36
E. Hipotesis	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Variabel Penelitian	39
1. Identifikasi Variabel Penelitian	39
2. Definisi Operasional Variabel	40
B. Pendekatan dan Teknik Penelitian	43
1. Pendekatan Penelitian	43
2. Teknik Penelitian	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian	44
1. Tempat Penelitian	44
2. Waktu Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel Penelitian	44
1. Populasi Penelitian.....	44
2. Sampel Penelitian	45
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	45
1. Sumber Data	45
2. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	47
1. Statistik Deskriptif	48
2. Model Estimasi	48
3. Penentuan Model Estimasi.....	49
4. Uji Asumsi Klasik.....	51
5. Analisis Regresi Data Panel.....	55
6. Uji Koefisien Determinasi	56
7. Uji Hipotesis	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Deskripsi Obyek Penelitian	62
B. Deskripsi Variabel Penelitian	66
1. Diskripsi Data Variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y).....	66
2. Deskripsi Data Variabel Rasio Efektifitas (X1) PAD Se-Jatim.....	72
3. Deskripsi Data Variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2) Se- Jatim.....	76

4. Deskripsi Data Variabel Rasio Pertumbuhan PAD (X ₃) Se-Jatim ...	80
C. Analisis Data.....	82
1. Model Estimasi Regresi Data Panel.....	82
2. Hasil Penentuan Model Estimasi	87
3. Uji Asumsi Klasik.....	89
4. Hasil Analisis Regresi Data Panel	92
5. Koefisien Determinasi	92
D. Pengujian Hipotesis	93
1. Hasil Uji Parsial	93
2. Hasil Uji Simultan	94
E. Pembahasan	95
1. Pengaruh Tingkat Rasio Efektifitas PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	95
2. Pengaruh Tingkat Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	97
3. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	99
4. Pengaruh Tingkat Rasio Efektifitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	100
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Kriteria Rasio Efektifitas Keuangan	42
Tabel 3.2 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	42
Tabel 4.1. Data Nilai Indeks Harapan Se-Jatim	66
Tabel 4.2. Data Nilai Indeks Harapan, pendidikan, Standar Hidup dan IPM Se-Jatim.....	68
Tabel 4.3. Data Angka Standar Hidup dan IPM Se-Jatim	69
Tabel 4.4. Rekap Indeks Pembangunan Manusia Se-Jatim.....	71
Tabel 4.5. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se-Jatim	73
Tabel 4.6. Rekap Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Se-Jatim	75
Tabel 4.7. Data Realisasi PAD dan Belanja Daerah Se-Jatim.....	77
Tabel 4.8. Rekap Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Se-Jatim	78
Tabel 4.9. Rekap Rasio Pertumbuhan PAD Se-Jatim.....	81
Tabel 4.10. Model CEM.....	83
Tabel 4.11. Model FEM	84
Tabel 4.12. Model REM.....	85
Tabel 4.13. Uji Chow	87
Tabel 4.14. Uji Hausman.....	87
Tabel 4.15. Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	88
Tabel 4.16. Hasil Uji Multikolinieritas	90
Tabel 4.17. Hasil Uji Autokorelasi.....	90
Tabel 4.18. Hasil Uji Heteroskedastisitas	91
Tabel 4.19. Model Persamaan Regresi.....	92
Tabel 4.20. Model Persamaan Regresi.....	92
Tabel 4.21. Hasil Uji Hipotesis	93

4
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tabel IPM Kabupaten/Kota Se – Jawa Timur	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	36
Gambar 4.1 Peta Kabupaten dan Kota Se-Jatim	62
⁹² Gambar 4.2 Uji Normalitas	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Data Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (Y) Sejatim Periode 2019-2021	106
Lampiran 2.	Data Perhitungan Rasio Keuangan Daerah (X) Sejatim Periode 2019-2021	107
Lampiran 3.	Data Tabulasi Periode 2019	113
Lampiran 4.	Data Penelitian Keuangan Jatim Periode 2021	115
Lampiran 5.	Hasil Regresi Data Panel Model Estimasi CEM	116
Lampiran 6.	Hasil Regresi Data Panel Model Estimasi FEM	116
Lampiran 7.	Hasil Regresi Data Panel Model Estimasi REM	117
Lampiran 8.	Hasil Uji Chow Perbandingan CEM dengan FEM	117
Lampiran 9.	Hasil Uji Hausman Perbandingan FEM dengan REM	118
Lampiran 10.	Hasil Uji LM (Largreng Multiplier).....	119
Lampiran 11.	UJI Noemalitas	119
Lampiran 12.	Hasil Uji prasyarat Multikolinieritas	120
Lampiran 13.	Hasil Uji Autokorelasi	120
Lampiran 14.	Hasil Uji Heteroskedastitas.....	120
Lampiran 15.	Hasil Analisis Regresi Data Panel dari Model FEM	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di dalam suatu wilayah. Dalam proses pembangunan meliputi berbagai macam perubahan yang terdapat pada aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, pembangunan merupakan syarat yang mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti dari keberhasilan pembangunan ekonomi meliputi kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*) yang merupakan tujuan pokok dan harus dicapai oleh setiap masyarakat. Menurut Baeti (2013) Kecukupan dalam hal ini menggambarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga keamanan yang sangat penting diperlukan oleh masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupannya.

Terkait dengan tingkat IPM pembangunan manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan suatu wilayah. Untuk mencapai pembangunan tidak terlepas dari kualitas manusia di dalam suatu wilayah. *United Development Programme* (UNDP) telah mengeluarkan suatu indikator yaitu *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia. IPM juga digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian pembangunan manusia yang lebih

berkualitas. Terdapat tiga dimensi dasar yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia yaitu meliputi standar hidup yang layak (*desend standart of living*), pengetahuan (*knowledge*), dan umur yang panjang serta hidup yang sehat (*a long life and healthy life*) (Badan Pusat Statistik, 2018).

IPM digunakan untuk menilai keberhasilan dalam kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang sangat baik. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik, maka akan membawa dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Adanya layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mencapai tingkat IPM yang tinggi nampaknya masih menjadi kendala atau permasalahan di Kab/Kota di Jawa Timur. Hal tersebut sebagaimana dengan data yang telah ditemukan yang bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dijelaskan pada Gambar 1 sebagai berikut.

Pacitan (68,57), Kabupaten Tuban (68,91), Kabupaten Pasuruan (68,93), Kabupaten Bojonegoro (69,59).

¹ Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi belum tentu dapat melaksanakan tugas penyediaan layanan publiknya secara baik jika pendapatan yang diterima tidak dikelola dengan baik. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya bergantung pada nominal pendapatannya, namun juga tata cara pengelolaannya.

²⁶ Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah dengan cara mengelola keuangan daerah dengan baik, sehingga sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun

¹⁶ 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Didalam penyajian pada suatu laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah, memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu komponen yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan tersebut adalah laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Melalui penyusunan ⁵² laporan realisasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran

entitas pelaporan. Laporan realisasi anggaran tersebut juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam periode yang akan datang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Setiap laporan realisasi anggaran harus disusun sesuai berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah suatu prinsip yang dimiliki akuntansi lalu diterapkan dalam penataan dan penyajian suatu laporan keuangan instansi pemerintah. Prinsip ini digunakan untuk menyusun dan menyajikan suatu laporan keuangan dalam instansi pemerintahan. Dengan kata lain SAP merupakan persyaratan atau acuan pemerintah yang harus memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Laporan realisasi anggaran dan standar akuntansi pemerintah sudah dinyatakan dalam PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran. Dalam PSAP tersebut juga sudah berisikan prinsip-prinsip mengenai laporan realisasi anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

⁴⁹ Fungsi utama dari suatu laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan sebuah informasi mengenai keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sosial, ekonomi, dan politik. Akan tetapi masih terdapat banyak pihak yang belum memahami tentang laporan keuangan dengan baik. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, oleh sebab itu dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan dapat menggunakan metode-metode dan salah satu yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Dengan menganalisis suatu laporan keuangan masyarakat dapat melihat kinerja keuangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

¹⁷ Amini dan Dari Wardani (2009) mengatakan bahwa tujuan politik dari pemerintah adalah demokratis, sedangkan tujuan administratifnya adalah dalam rangka efektivitas. Efektivitas yang dimaksud merupakan efektivitas dalam pengelolaan PAD yang merupakan salah satu sumber pendanaan. ⁶⁵ Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan. Indikator rasio efektivitas saja belum cukup, maka dari itu diperlukanlah juga rasio efisiensi untuk menghitung PAD. ¹⁷ Pemerintah daerah yang mengelola PAD secara efektif dan efisien diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyediaan layanan publik. Sehingga dengan layanan publik yang baik akan tercapai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi.

²¹ Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Zul Hendri, dkk. (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pajak daerah dan berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Mahardika Evlyn, dkk. (2018) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Marisca

Harliyani, dkk. (2016) menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM. Sementara dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Maulin, dkk. (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan meneliti kembali rasio-rasio keuangan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Ditemukan adanya *gap* tingkat Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Ditemukan adanya perbedaan hasil riset tentang hubungan efisiensi keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dibahas dengan tuntas serta terfokus, maka diperlukanlah pembatasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh rasio keuangan terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021, melalui rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan juga melalui pertumbuhan PAD.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat rasio efektivitas PAD secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat rasio efisiensi keuangan daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan PAD secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan pertumbuhan PAD secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat rasio efektivitas PAD secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat rasio efisiensi keuangan daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan PAD secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ¹⁰ rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan pertumbuhan PAD secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

⁶ F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

²⁸ Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai ¹⁷ pengaruh rasio keuangan terhadap indeks pembangunan manusia yang ditinjau dari rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Serta dapat juga digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti yang tertarik di bidang kajian ini. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan penelitian berikutnya.

¹⁰ 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi atau sumbangan pemikiran kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang kajian yang sama.

² b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan juga masukan agar pemerintah lebih meningkatkan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah dan juga meningkatkan

pelayanan publik kepada masyarakatnya.

c. ⁸ Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang ¹⁰ dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama ⁸ serta mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia

a. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report, 1995:103*), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah :

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan manusia tetapi juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- 4) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu : produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan

akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu

1) Produktivitas

Penduduk harus meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2) Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3) Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4) Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses

pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

b. Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna. UNDP menyebutkan bahwa ada indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI sebagai berikut :

- 1) *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- 2) *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- 3) *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil

per kapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Menurut UNPD (1996) dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain :

1) Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2) Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak, UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP *adjusted*. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

3) Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Menurut (Todaro, 2006) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi :

- 1) Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
- 2) Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam *self esteem* (jati diri).
- 3) Kebebasan dari sikap menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materiil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

30

c. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Algifari (2014) menjelaskan indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

- 1) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- 2) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- 3) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{(\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})}$$

Keterangan :

X1 : Indeks Harapan Hidup

X2 : Indeks Pendidikan

X3 : Indeks Standar Hidup Layak

2. Laporan Keuangan

¹³ a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017) mendefinisikan bahwa “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi)”. Sedangkan menurut Jumingan (2005)

laporan keuangan merupakan hasil penyajian atau ringkasan data keuangan perusahaan yang digunakan untuk kepentingan manajemen atau pihak lain agar laporan keuangan dapat menarik perhatian bagi yang memiliki kepentingan dengan data laporan keuangan perusahaan.

Menurut Harahap (2011)

¹³ Laporan keuangan merupakan sebagai sumber informasi sekaligus semua aktivitas yang terdapat pada semua perusahaan. Jika perusahaan semakin baik dan benar dalam menyajikan suatu laporan keuangan maka sangat berguna bagi siapa saja dalam pengambilan keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan media informasi yang dijadikan untuk sebuah perhitungan dalam pengambilan keputusan. Jika dalam penyajian laporan keuangan menunjukkan keuangan perusahaan baik dan benar ¹³ maka bisa dijadikan sebuah pengambilan keputusan dan menarik para investor untuk menanamkan modal di perusahaan dan menunjukkan

tingkat keberhasilan perusahaan dalam manajemen perusahaan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama pelaporan keuangan menurut FASB yang tertuang dalam PSAK No. 1 adalah (Suwardjono : 2005) :

- 1) Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor ataupun pemakai lain, baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan sebagainya yang rasional. Informasi harus dipahami bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan bisnis dan ekonomi serta bersedia untuk mempelajari informasi dengan cukup tekun.
- 2) Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor ataupun pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jumlah, saat terjadi, dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk memberi informasi mengenai hasil dan risiko atas investasi yang akan dilakukan.
- 3) Penyajian laporan keuangan harus berupa pengungkapan lengkap mengenai semua informasi yang relevan agar para investor dapat membuat evaluasi sendiri mengenai kemampuan perusahaan (Hendriksen 1998:201).

3. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut (Kasmir : 2012) “Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas yang terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan suatu pekerjaan”.

Kinerja merupakan suatu pencapaian atas apa yang telah direncanakan. Apabila dalam pencapaiannya melebihi dari yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja tersebut baik. Tetapi jika pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan maka akan dikatakan

tidak baik.

Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999

tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi”.

Sedangkan menurut Permendagri Tahun 2006 menyebutkan bahwa

“kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu. Hal tersebut merupakan kemampuan dalam suatu daerah untuk mengelola seluruh sumber-sumber keuangan asli daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

b. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang

dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses, atau suatu organisasi.

Menurut (Mahmudi : 2011)

Secara umum pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan

Menurut Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa tujuan pengukuran kinerja sektor publik antara lain :

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja yang dimaksud untuk dapat membantu pemerintah fokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan.
- 3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki kelembagaan.

Sedangkan berikut tujuan penilaian kinerja di dalam sektor publik menurut (Deddi dan Ayuningtyas : 2011) :

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- 3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
- 5) Memotivasi pegawai.
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dalam satu periode anggaran. Dalam menjalankan pemerintahan

seperti pembangunan ataupun pelayanan masyarakat wajib untuk melapor pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dapat dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah sudah berhasil dalam menjalankan tugas yang diberikan secara baik atau tidak. Dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah untuk mengelola keuangan didaerahnya terdapat suatu alat yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

c. Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan datang.

Ardi (2018) menyebutkan bahwa hasil analisis rasio keuangan digunakan untuk tolak ukur dalam :

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi keuangan daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintahan daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

d. Jenis-jenis Rasio Keuangan

Halim (2012) menyebutkan terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah, meliputi :

1) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan (Halim : 2012). Menurut (Andriyani et al., 2020), rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan menyejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim : 2012). Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan

pendapatnya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini (Andriyani et al., 2020) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%.

3) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan (Halim : 2012). Berikut perhitungan dengan persamaan sebagai berikut ini (Andriyani et al., 2020):

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} \text{PADt} - \text{PADt-1} &= \text{Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelum} \\ \text{PADt-1} &= \text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun} \\ &\text{sebelumnya.} \end{aligned}$$

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti :

1. Zul Hendri, dkk. (2020)

Dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Daerah Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia, rasio yang digunakan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pajak daerah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pajak daerah dan berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Mahardika Evlyn, dkk. (2018)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dan rasio kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Eka Marisca Harliyani, dkk. (2016)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pendapatan daerah dan belanja daerah di Provinsi Jambi. Untuk menganalisis kinerja keuangan dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi PAD dan keserasian belanja langsung dan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari variabel penelitian hanya 2 variabel yang signifikan berpengaruh terhadap IPM, dari kedua variabel tersebut adalah rasio derajat

desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung. Sementara itu 3 variabel yaitu rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan temuan penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa IPM di Provinsi Jambi periode 2001-2014 dipengaruhi oleh rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung.

4. Siti Munfarida, dkk. (2020)

Dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Tetapi rasio kemandirian dan rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

5. Fadli Ali Taslim, dkk. (2018)

Dengan Penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah,

rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan rasio efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

6. Febri Nurgita Sari, dkk. (2020)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan khususnya derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia.. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif menggambarkan adanya hubungan yang berlawanan. Sementara, rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penelitian	Jenis Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara. Fadli Ali Taslim, dkk. (2021)	Kuantitatif	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan rasio efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	1. Judul Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Waktu Penelitian
2	Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Zul Hendri, dkk. (2020)	Deskriptif Kuantitatif	Regresi Linier Berganda	hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian	1. Judul Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Waktu Penelitian

No	Judul dan Penelitian	Jenis Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				<p>5 keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pajak daerah dan berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia.</p>	
3.	<p>3 Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Febri Nur Gitasari, dkk. (2020)</p>	Kuantitatif	Regresi Linier Berganda	<p>3 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif menggambarkan adanya hubungan yang berlawanan.</p>	<p>1. Judul Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Waktu Penelitian</p>

No	Judul dan Penelitian	Jenis Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				Sementara, rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	
4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Siti Munfarida, dkk. (2020)	Kuantitatif	Analisis Regresi Data Panel	hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Tetapi rasio kemandirian dan rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	1. Judul Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Waktu Penelitian
5.	Pengaruh Kinerja	Kuantitatif	Regresi Linier	hasil penelitian ini	1. Judul Penelitian

No	Judul dan Penelitian	Jenis Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Mahardika Evlyn, dkk. (2018)		Berganda	menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dan rasio kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.	2. Tahun Penelitian 3. Waktu Penelitian
6.	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Eka Marisca Harliyani, dkk. (2016)	Deskriptif	Regresi Linier Berganda	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari variabel penelitian hanya 2 variabel yang signifikan berpengaruh terhadap IPM, dari kedua variabel tersebut adalah rasio	1. Judul Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Waktu Penelitian

No	Judul dan Penelitian	Jenis Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				<p>derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung. Sementara itu 3 variabel yaitu rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan temuan penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa IPM di Provinsi Jambi periode 2001-2014 dipengaruhi oleh rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung.</p>	

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi belum tentu dapat melaksanakan tugas penyediaan layanan publiknya secara baik jika pendapatan yang diterima tidak dikelola dengan baik. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya bergantung pada nominal pendapatannya, namun juga tata cara pengelolaannya. Amani dan Dariwardani (2009) mengatakan bahwa tujuan politik dari pemerintah adalah demokratisasi, sedangkan tujuan administratifnya adalah dalam rangka efektivitas. Efektivitas yang dimaksud merupakan efektivitas alam pengelolaan PAD yang merupakan salah satu sumber pendanaan. Setyowati dan Suparwati (2012) dan Ardiansyah et al (2014) meneliti pengaruh PAD terhadap IPM. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah daerah yang mengelola PAD secara efektif diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyediaan layanan publik. Sehingga dengan layanan publik yang baik akan tercapai IPM yang tinggi.

2. Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat

berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Hal ini memerlukan data-data realisasi belanja dan juga realisasi pendapatan. Perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat.

3. Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1995). Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia di atas dipengaruhi oleh tingkat dan distribusi pendapatan, tingkat pendidikan serta sejauh mana peran perempuan dalam mengontrol

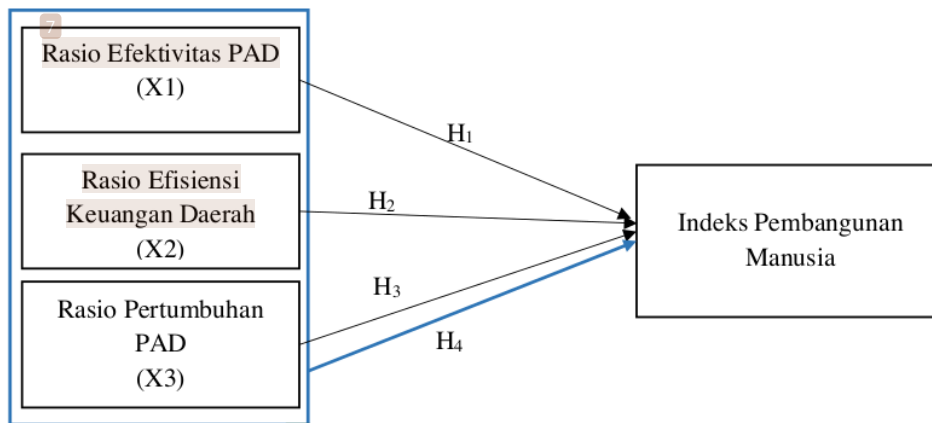
pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Jika semua itu sudah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Dalam peningkatan perekonomian juga akan mempengaruhi pembangunan manusia, ketika pendapatan atau PDB per kapita meningkat berarti pengeluaran rumah tangga untuk meningkatkan pembangunan manusia menjadi naik. Selain ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita penduduk, distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pada saat distribusi pendapatan buruk atau terjadi ketimpangan pendapatan menyebabkan banyak rumah tangga mengalami keterbatasan keuangan. Akibatnya mengurangi pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang mengandung gizi baik (Ramirez et.al, 1998). Pengeluaran lebih banyak ditujukan untuk mengonsumsi makanan yang tidak mengandung banyak asupan gizi dan nutrisi yang baik (UNDP, 1995).

Dengan demikian, jika terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin mendorong mereka untuk membelanjakan pengeluaran rumah tangganya agar dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. Penelitian (Maulana &

Bowo, 2013) dan (Ronald & Sarmiyatiningsih, 2014) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, fasilitas publik seperti pendidikan dan rumah sakit yang akan mendorong tingginya indeks pembangunan manusia

D. Kerangka Konseptual

Menurut (Hamid dalam Widyantoro 2013:341) kerangka berpikir merupakan sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka konseptual penelitian ini digambarkan dengan gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan

- = Pengaruh parsial X terhadap Y
 → = Pengaruh simultan X₁, X₂ X₃ terhadap Y

E. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dari permasalahan yang diangkat atas landasan teori, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

1. Hipotesis ke 1

(H₁) : Tingkat rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

(H₀) : Tingkat rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Hipotesis ke 2

(H₁) : Tingkat rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

(H₀) : Tingkat rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

3. Hipotesis ke 3

(H₁) : Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

(H₀) : Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

4. Hipotesis ke 3

(H₁) : Tingkat rasio efektivitas, tingkat rasio efisiensi, dan pertumbuhan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

(H₀) : Tingkat rasio efektivitas PAD, tingkat rasio efisiensi keuangan daerah, dan pertumbuhan PAD secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

1. Identifikasi Variabel Penelitian

Definisi variabel penelitian menurut Sugiyono (2010:59) adalah “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Menurut Sugiyono (2010:59) menyebutkan menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain ada dua macam variabel, yaitu :

a. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen), yang disimbolkan dengan simbol (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel Terikat (*Dependent Variabel*) adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y).

b. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen), yang disimbolkan dengan simbol (X). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*Independent Variabel*) adalah :

X1 : Rasio Efektivitas PAD

X2 : Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

X3 : Rasio Pertumbuhan PAD

2. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015:38) definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan dalam berbagai variabel operasional yang didefinisikan sebagai berikut ini :

a. Variabel Terikat

1) Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Konsep pembangunan manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. UNDP (*United Nation Development Programe*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu pengukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) merupakan suatu

proses untuk dapat mengetahui kemampuan suatu daerah atau negara dalam pencapaian dan pengembangan pembangunan. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan manusia, maka kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup akan semakin baik. Menurut Algifari (2014) rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut ini :

$$IPM = \sqrt[3]{(\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})}$$

Keterangan :

X1 : Indeks Harapan Hidup

X2 : Indeks Pendidikan

X3 : Indeks Standar Hidup Layak

b. Variabel Bebas

1) Rasio Efektivitas PAD (X1)

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Andriyani et al., 2020)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Suatu pemerintahan atau perusahaan dapat dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat. Berikut ini kriteria dalam penilaian efektivitas:

Tabel 3.1 Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan

Persentase	Kriteria Efektivitas
81% - 100%	Sangat efektif
61% - 80%	Efektif
41% - 60%	Cukup efektif
20% - 40%	Tidak Efisien
< 20%	Sangat tidak efektif

Sumber: Suharsana & Natalelawati (2018)

2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2)

Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Andriyani et al., 2020) :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah, maka terdapat beberapa kriteria-kriteria dalam pencapaian tingkat rasio efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak efisien
91%-100%	Kurang efisien
81% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
< 60	Sangat efisien

Sumber: Efendi et al., (2019)

3) Rasio Pertumbuhan PAD (X3)

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke

periode berikutnya. Tentunya diharapkan pertumbuhan berpengaruh positif dan kecenderungannya meningkat (Andriyani et al., 2020):

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}$ = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelum

PAD_{t-1} = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan bahwa “pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik”. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif adalah data yang dianalisis dalam penelitian ini berbentuk angka yang bersifat dapat diukur, rasional, dan sistematis. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan faktor pendukung antara variabel-variabel yang bersangkutan kemudian dianalisis.

2. Teknik Penelitian

Peneliti menggunakan racangan penelitian kuantitatif dengan jenis statistik deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan hasil data

yang sudah terkumpul sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan untuk dapat membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Analisis ini hanya mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan dengan akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam menguji hipotesis.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 kota. Melalui website <https://djk.kemenkeu.go.id/> untuk memperoleh data-data tentang laporan keuangan maupun APBD pada Kabupaten/Kota yang akan diteliti.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan adalah 4 bulan terhitung dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:117) mendefinisikan populasi sebagai berikut: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Pada penelitian ini populasi yang akan digunakan merupakan kabupaten dan kota

yang ada di Jawa Timur pada tahun 2019-2021 dengan jumlah 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur.

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 118), sampel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu *total sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2019-2021 dengan jumlah 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur.

E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data *time series* dan *cross sections*. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk Kemenkeu) serta laporan-laporan yang menunjang. Data yang

dikumpulkan pada penelitian ini disesuaikan dengan variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian yang dilakukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224) mendefinisikan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan dengan pembahasan masalah. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi, catatan kuliah, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan bahwa “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Data-data tersebut peneliti dapatkan dengan cara mengakses (*browsing*) dari DJPK.Kemenkeu.Id.

c. Riset Internet (*Online Research*)

Riset internet merupakan pengumpulan data yang berasal dari situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Maleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier regresi berganda yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dan independen secara menyeluruh secara parsial. Untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam penggunaan model regresi linier berganda perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik dan analisis regresi data panel untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten serta dilakukan uji estimasi model.

2 1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan fenomena atau data sebagaimana dalam bentuk tabel, grafik, rata-rata, frekuensi ataupun bentuk lainnya. Dalam statistik deskriptif, analisis dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, kolom, perhitungan frekuensi, ukuran tendensi pusat (*mean, median, modus*), ukuran *disperse* (kisaran, standar deviasi, varian) dan lain sebagainya. Statistik deskriptif mendeskripsikan data sehingga informasi lebih jelas dan mudah dipahami. Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis, bagaimana profil dan distribusi variabel-variabel tersebut.

2. Model Estimasi

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Ada dua manfaat yang diperoleh jika menggunakan data panel yaitu pertama mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, mampu mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*). Menurut Gujarati dalam Faisol (2020), terdapat tiga metode yang digunakan untuk bekerja dengan data panel yaitu :

a. *Common Effect Model*

Model regresi *Common Effect Model* (CEM) atau *Pooled Least Square Model* (PLS) merupakan teknik yang paling sederhana untuk

mengestimasi data panel. Metode ini secara sederhana menggabungkan seluruh data *time series* dan *cross section*.

b. Fixed Effect Model

Fixed Effect Model (FEM) memiliki persamaan yang tidak konstan data *cross section* dan koefisien dari regresi tidak berbeda pada setiap individu dan waktu. Penggunaan pengujian ini disarankan jika data panel memiliki jumlah rentang waktu lebih besar dari jumlah individu penelitian.

c. Random Effect Model

Teknik ini memperhitungkan bahwa *error term* atau kesalahan mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Pengujian *Random Effect Model* (REM) ini disarankan jika pada data panel jumlah rentang waktu atau *time series* lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah individu penelitian.

3. Penentuan Model Estimasi

Sebelum melakukan estimasi dengan regresi data panel perlu dilakukan pemilihan dari ketiga model yang sudah dipaparkan diatas yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik untuk dapat mengestimasi data panel terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan yaitu Uji Chow, Uji *Lagrange Multiplier* dan Uji Hausman.

a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk pemilihan manakah model terbaik yang akan digunakan antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Common Effect*

Model (CEM). Adapun ketentuan pemilihan model menurut Gujarati dalam Faisol (2020) adalah Jika nilai *probability* lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($<0,05$) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Adapun jika nilai *probability* lebih besar dari $> 0,05$ maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

H0 : $(\text{Prob} > F) > 0,05$, maka menggunakan model CEM

H1 : $(\text{Prob} > F) < 0,05$, maka menggunakan model FEM

b. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* ini digunakan untuk menentukan manakah uji estimasi terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Menurut Gujarati dalam Faisol (2020), Pengujian ini dilakukan apabila hasil uji chow menunjukkan bahwa model yang lebih tepat untuk digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM) dan pada uji hausman menunjukkan bahwa model yang lebih tepat untuk digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Adapun hipotesis sebagai berikut :

H0 : $(\text{Prob} > \text{chibar}^2) > 0,05$, maka menggunakan model CEM

H1 : $(\text{Prob} > \text{chibar}^2) < 0,05$, maka menggunakan model REM

c. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk pengujian statistik memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Ide dasar Hausman test adalah hubungan yang berbanding terbalik antara model yang bisa dan model yang efisien. Adapun pengujian Hausman

dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : (\text{Prob} > \text{chibar}_2) > 0,05$, maka menggunakan model REM

$H_1 : (\text{Prob} > \text{chibar}_2) < 0,05$, maka menggunakan model FEM

4. Uji Asumsi Klasik

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Guna memenuhi syarat yang ditentukan dalam penggunaan model regresi data panel perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang digunakan sebelum melakukan pengujian hipotesis, yaitu : Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heterokedastisitas yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Menurut Ghozali (2016) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik :

1) Analisis Grafik

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *software Eviews versi 12*. Pada uji skewness dan kurtosis, dengan menghitung nilai skewness dan kurtosis yang

diperoleh dan membandingkannya dengan nilai standar deviasi dari residual. Data dapat dikatakan normal dengan mengacu pada kaidah keputusan jika nilai yang dihasilkan berada dalam interval -2 sampai 2.

Menurut Ghozali (2016) Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dengan analisis grafik normal histogram dapat dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Data dikatakan berdistribusi normal apabila data yang berupa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
- b) Data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal.

Menurut Ghozali (2016) metode lain yang digunakan dalam analisis grafik adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dimana dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dengan analisis grafik normal *probability plot* dapat dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Data dikatakan berdistribusi normal apabila data yang berupa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
- b) Data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal.

2) Analisis Statistik

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov*. Dari tabel *One-Sample Kolmogorov-*

Smirnov Test diperoleh angka probabilitas atau *Asym. Sig. (2-tailed)*. Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 untuk pengambilan keputusan dengan pedoman:

⁴⁵ Berdasarkan tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh angka probabilitas atau *Asym. Sig. (2-tailed)*. Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 untuk pengambilan keputusan dengan pedoman. Menurut Anggoro (2019) ada pun kriteria yang digunakan adalah:

- a) Jika $t \text{ hitung} < \text{atau sig} > 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak
- b) Jika $t \text{ tabel} > \text{atau sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Agus Widarjono (2017) “multikolinearitas adalah adanya hubungan antara variabel independen dalam satu regresi”. Dalam sebuah penelitian uji ini memiliki tujuan untuk melihat adakah korelasi atau tidak ³³ diantara variabel independen pada suatu model regresi. Karena jika tidak ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel tersebut dapat dipastikan model regresinya baik. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai ¹¹ tolerance dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolinieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,01$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139-143), tujuan pengujian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, namun jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011:139-143) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti gelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu suatu keadaan dimana terjadi korelasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengkaji apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$). Jika terjadi korelasi maka dinamakan penyakit autokorelasi.

Menurut Ghozali (2016) “tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi”. Menurut Ghozali (2016):

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan cara menggunakan uji Durbin Watson (DW). Uji ini digunakan dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson dengan table Durbin Watson. Dalam table Durbin Watson terdapat nilai batas atas (*upper bound* atau *du*) dan nilai batas atas (*lower bound* atau *d1*).

Setelah itu membandingkan nilai statistik *d* dengan *DI* (*d Lower*) dan *du* (*d Upper*) dari tabel sesuai ketentuan berikut:

- a) Bila $d < dL$, berarti ada korelasi yang positif.
- b) Bila $dL \leq d \leq dU$, berarti tidak dapat di ambil kesimpulan apa- apa.
- c) Bila $dU \leq d \leq 4-dU$, berarti ada korelasi yang positif maupun negatif.
- d) Bila $4-dU \leq d \leq 4-dL$, berarti tidak dapat di ambil kesimpulan apa-apa.
- e) Bila $d > 4-dL$, berarti ada korelasi yang negatif.

5. Analisis Regresi Data Panel

Menurut Sugiyono (2018:188) “Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau predictor.” Dalam bahasa inggris, istilah ini disebut dengan *multiple linear regression*. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

pengaruh antara variabel X1 (Rasio Efektivitas PAD), X2 (Rasio Efisiensi Keuangan Daerah), dan X3 (Pertumbuhan PAD) terhadap Y (Indeks Pembangunan Manusia). Persamaan regresi linier data panel dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Sumber: Sugiyono (2018:188)

Keterangan:

Y = Variabel dependent (IPM)

a = Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien regresi

X1 = Variabel rasio efektivitas PAD

X2 = Variabel rasio efisiensi keuangan daerah

X3 = Variabel pertumbuhan PAD

i = Menunjukkan kabupaten/kota

t = Menunjukkan periode waktu (tahun) pengamatan

e = error / variabel pengganggu

6. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016:95) menyatakan bahwa: “koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu”.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X₁ (rasio efektivitas PAD), X₂ (rasio efisiensi keuangan daerah), X₃

(pertumbuhan) terhadap variabel Y (indeks pembangunan manusia). Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi, maka dapat dihitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus:

$$Kd = r^2 \times 100$$

Sumber : Ghozali (2016)

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Kuadrat koefisien korelasi berganda

Menurut Ghozali (2016) kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

- a) Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- b) Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

7. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak ada pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, secara simultan dan parsial. Uji hipotesis untuk korelasi ini dirumuskan dengan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa besar

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017) “uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen”.

Menurut Sugiyono (2018) Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain konstan. Hipotesis nol yang digunakan:

$H_0 : \beta_1 = 0$ variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan melihat nilai signifikansi pada masing-masing variabel penelitian. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 ($p > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

Sebaliknya, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Uji t menggunakan beberapa langkah analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel. Berikut adalah tahapan atau langkah langkah yang digunakan dalam uji t :

- 1) Menyatakan rancangan hipotesis
 - a) $H_0 : \beta_1 = 0$ variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - b) $H_a : \beta_1 \neq 0$ variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Menentukan nilai signifikan 0.05
- 3) Perbandingan nilai signifikan level (*alpha*)
 - a) nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 ($p > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b) nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 4) Menarik kesimpulan
 - a) H_0 diterima dan H_a ditolak ini berarti secara parsial variabel rasio efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi keuangan daerah (X2) dan pertumbuhan PAD (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia (Y).
 - b) H_0 ditolak dan H_a diterima ini berarti secara parsial oleh variabel efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi keuangan daerah (X2) dan pertumbuhan PAD (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia (Y).

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji statistik F pada dasarnya untuk menunjukkan apakah variabel-variabel independen yang

dimasukkan dalam model secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2017) uji F digunakan pada dasarnya menunjukkan :

Apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

- 1) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ semua parameter secara simultan sama dengan nol. Artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ semua parameter secara simultan tidak sama dengan nol. Artinya semua variabel independen secara simultan.

Uji f menggunakan beberapa langkah analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel. Berikut adalah tahapan atau langkah langkah yang digunakan dalam uji f :

- 1) Menyatakan rancangan hipotesis
 - a) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ semua parameter secara simultan sama dengan nol.
 - b) $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ semua parameter secara simultan tidak sama dengan nol.
- 2) Menentukan nilai signifikan sebesar 0,05
- 3) Perbandingan nilai signifikan level (*alpha*)
 - a) nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b) nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4) Menarik kesimpulan

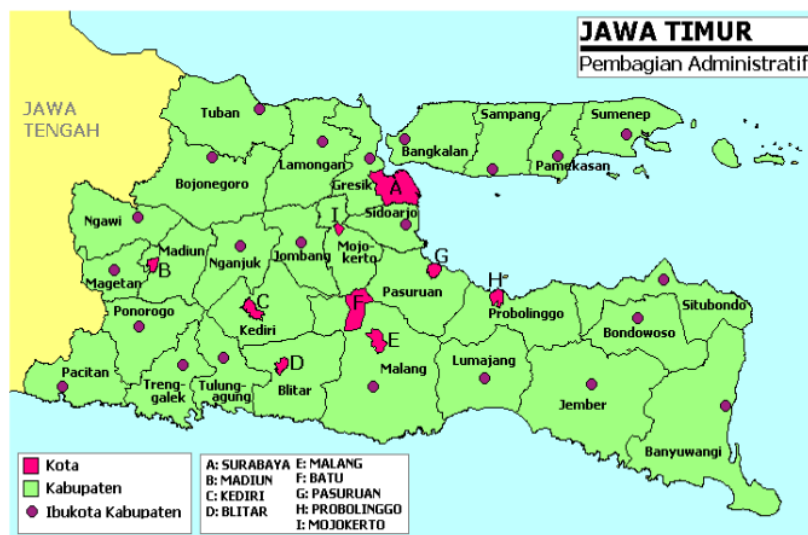
- a) H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya semua variabel efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi keuangan daerah (X2) dan pertumbuhan PAD (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia (Y).
- c) H_0 diterima dan H_a Artinya, semua variabel efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi keuangan daerah (X2) dan pertumbuhan PAD (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi Indonesia. Aktivitas ekonomi provinsi ini menyumbang hampir 15 persen produk domestik bruto nasional, nomor dua setelah DKI Jakarta. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1950. Dasar hukum pembentukan ini kemudian diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur. Hari jadinya ditetapkan pada 12 Oktober berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007. Ibu kotanya terletak di Surabaya. Berikut peta gugus kabupaten dan kota wilayah Jawa Timur:



Gambar 4.1 Peta Kabupaten dan Kota Se-Jatim

Provinsi terluas di pulau Jawa ini secara administratif terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, 666 kecamatan, dan 8.501 desa/kelurahan (BPS, 2020: 5). Populasi penduduknya mencapai sekitar 39,69 juta jiwa, terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur sebagai suatu wilayah, menyimpan bukti sejarah dari masa yang paling tua hingga abad ke-20. Wilayah ini telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah seperti diungkap dalam buku Sejarah Daerah Jawa Timur, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978. Penemuan sisa-sisa dari fosil *Pithecanthropus Mojokertensis* di Kepuhlagen, Mojokerto, *Pithecanthropus Erectus* di Trinil, Ngawi, dan *Homo Wajakensis* di Wajak, Tulungagung menjadi bukti sejarah pada masa itu.

Menurut laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, wilayah ini baru muncul pertama kali dalam pentas sejarah pada abad ke-8 dengan ditemukannya bukti arkeologi prasasti Dinoyo di kawasan Malang Raya. Berdasarkan prasasti bertahun 760 itu, pada abad VIII di Malang telah ada suatu pusat kegiatan politik yang pertama, sistem pemerintahan yang tertata, serta susunan masyarakat yang teratur seperti golongan petani, punggawa, dan bangsawan.

Sejarah panjang Jawa Timur bisa dilihat sejak abad ke-10 masehi dengan ditemukannya bukti sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan dengan kekuasaan di Jawa Timur, di antaranya Kerajaan Medang pada tahun 937–1017. Setelah itu, Kerajaan Kahuripan tahun 1019-1049, Kerajaan Dhaha Janggala tahun 1080–1222, Kerajaan Singosari tahun 1222–1292, serta Kerajaan Majapahit tahun 1293–1527. Bahkan jauh sebelum itu, Mpu Sendok, pada dekade 929–947, telah meletakkan fondasi pemerintahan di Jawa Timur dengan membentuk struktur

hirarkis dengan pembagian Kraton sebagai pusat pemerintahan, Watek sebagai pusat kedaerahan, dan Wanua sebagai pusat desa. Pada abad ke-13, perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur ditandai dengan munculnya struktur baru dalam pemerintahan, yaitu Nagara (provinsi). Berdasarkan Prasasti Mulamalung (1255) dari masa Wisnu Wardhana yang juga bergelar Sminingrat menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singasari dari Pusat (Kraton), Nagara (Provinsi), Watek (Kabupaten), dan Wanua (Desa).

Pada masa Kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan, terdiri dari Bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek / Wisaya (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/ Kuwu (Kademangan), Thani/ Wanua (Desa/ Petinggi) dan paling bawah Kabuyutan (Dusun/Rama). Struktur kenegaraan Majapahit justru berkembang secara ketat pada masa Mataram (1582–755). Wilayah Mataram dibagi secara konsentris dan terdiri dari Kuthagara/Nagara (Pusat/Kraton), Negaragung /Negaraagung (Provinsi Dalam), Mancanegara (Provinsi Luar), Kabupaten dan Desa.

Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul dengan nama Bang Wetan, dengan wilayah meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (pedalaman Jawa Timur). Perkembangan lain, bangsa Portugis adalah bangsa barat yang pertama kali datang di Jawa Timur. Kapal Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Pulau Madura pada tahun 1596. Surabaya jatuh ke tangan VOC pada tanggal 13 Mei 1677.

Selanjutnya setelah huru-hara China di Kartasura (1743), seluruh wilayah

pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura jatuh ke tangan Hindia Belanda, sedang daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa (Mancanagara Wetan –Mancanagara Kulon). Dengan berakhirnya Perang Diponegara (1830), seluruh Jawa Timur (Bang Wetan) dapat dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1830–1928/1929, Belanda menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung Pemerintah Pusat VOC di Batavia dengan para bupati yang berada di wilayah kekuasaanya.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Provincient van Oost Java) pada tahun 1929, dengan struktur pemerintahan, wilayah dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) seperti daerah lain, Jawa Timur diletakkan di bawah pendudukan militer Jepang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dibentuklah provinsi dan penentuan para gubernurnya. Kala itu, Indonesia terbagi menjadi 8 Provinsi dan Jawa Timur termasuk salah satu provinsi tersebut. Pada 20 Februari 1948 di Madura dibentuk Negara Madura, dan tanggal 26 November 1948 dibentuk Negara Jawa Timur yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Negara Jawa Timur dibubarkan dan bergabung ke dalam Republik Indonesia pada 25 Februari 1950. Pada 7 Maret 1950 Negara Madura juga memberikan pernyataan serupa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, dibentuklah

Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Soeryo sebenarnya mulai diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur pada 19 Agustus 1945. Hanya saat itu Gubernur Soeryo masih merangkap menjadi Residen Bojonegoro. Oleh karena itu, momentum mulai berkantornya Gubernur Soeryo di Gedung Grahadi Surabaya pada 12 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari kelahiran provinsi tersebut. Atas dasar perjalanan sejarah inilah, kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Peraturan tersebut menetapkan 12 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Deskripsi Data Variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan data variabel indeks pembangunan manusia (Y) Se-Jawa Timur selama periode 2019-2021 diperoleh dari kuadrat indeks harapan hidup, indeks pendidikan daerah, indeks standar hidup dari nilai pengeluaran perkapita. Berikut deskripsi dari nilai indeks dalam menghitung indeks pertumbuhan ekonomi:

Tabel 4.1. Data Nilai Indeks Harapan Se-Jatim

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Angka Harapan Hidup (%)		
		2019	2020	2021
1	Kabupaten Pacitan	71.77	72.07	72.48
2	Kabupaten Ponorogo	72.65	72.85	73.20
3	Kabupaten Trenggalek	73.59	73.86	74.26
4	Kabupaten Tulungagung	73.95	74.16	74.54
5	Kabupaten Blitar	73.39	73.61	73.98
6	Kabupaten Kediri	72.54	72.65	72.97
7	Kabupaten Malang	72.45	72.61	72.95
8	Kabupaten Lumajang	69.94	70.21	70.61

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Angka Harapan Hidup (%)		
		2019	2020	2021
9	Kabupaten Jember	68.99	69.28	69.68
10	Kabupaten Banyuwangi	70.54	70.72	71.06
11	Kabupaten Bondowoso	66.55	66.89	67.29
12	Kabupaten Situbondo	68.97	69.24	69.62
13	Kabupaten Probolinggo	67	67.36	67.78
14	Kabupaten Pasuruan	70.17	70.25	70.55
15	Kabupaten Sidoarjo	73.98	74.06	74.36
16	Kabupaten Mojokerto	72.43	72.59	72.93
17	Kabupaten Jombang	72.27	72.49	72.86
18	Kabupaten Nganjuk	71.44	71.60	71.95
19	Kabupaten Madiun	71.22	71.50	71.90
20	Kabupaten Magetan	72.49	72.65	72.97
21	Kabupaten Ngawi	72.16	72.41	72.81
22	Kabupaten Bojonegoro	71.36	71.72	72.16
23	Kabupaten Tuban	71.26	71.56	71.97
24	Kabupaten Lamongan	72.27	72.49	72.86
25	Kabupaten Gresik	72.61	72.67	72.99
26	Kabupaten Bangkalan	70.11	70.22	70.54
27	Kabupaten Sampang	67.96	68.07	68.38
28	Kabupaten Pamekasan	67.45	67.67	68.03
29	Kabupaten Sumenep	71.22	71.56	71.99
30	Kota Kediri	73.96	74.04	74.34
31	Kota Blitar	73.6	73.86	74.26
32	Kota Malang	73.15	73.36	73.75
33	Kota Probolinggo	70.19	70.35	70.68
34	Kota Pasuruan	71.4	71.60	71.96
35	Kota Mojokerto	73.21	73.39	73.74
36	Kota Madiun	72.75	72.83	73.13
37	Kota Surabaya	74.13	74.18	74.47
38	Kota Batu	72.54	72.65	72.97

Berdasarkan rekap nilai indeks yang menjadi komponen dalam melakukan perhitungan indeks pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota se-Jawa Timur periode 2019-2021 dapat diketahui bahwa, rata-rata indeks angka harapan hidup (IHH) periode 2019 memiliki IHH 71,52% dengan

pencapaian terendah dari Kabupaten Bondowoso 66,65% dan IHH tertinggi Kota Surabaya 74,13%. Untuk periode 2020 memiliki rata-rata IHH sebesar 71,72% dengan pencapaian IHH terendah oleh kabupaten Bondowoso 66,89% dan tertinggi Kota Surabaya 74,18%. Sedangkan, periode 2021 rata-rata IHH sebesar 72,08% dengan pencapaian IHH terendah kabupaten Bondowoso sebesar 67,29% dan tertinggi Kota Surabaya 74,54%. Sehingga selama 3 tahun berturut-turut 2019-2021 kota Surabaya memiliki indeks harapan hidup tertinggi.

Tabel 4.2. Data Nilai Indeks Harapan, pendidikan, Standar Hidup dan IPM Se-Jatim

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Indeks Pendidikan (%)		
		2019	2020	2021
1	Kabupaten Pacitan	0.59	0.60	0.61
2	Kabupaten Ponorogo	0.62	0.63	0.63
3	Kabupaten Trenggalek	0.58	0.59	0.60
4	Kabupaten Tulungagung	0.63	0.65	0.65
5	Kabupaten Blitar	0.59	0.59	0.60
6	Kabupaten Kediri	0.62	0.63	0.64
7	Kabupaten Malang	0.61	0.61	0.62
8	Kabupaten Lumajang	0.54	0.54	0.55
9	Kabupaten Jember	0.57	0.59	0.59
10	Kabupaten Banyuwangi	0.59	0.59	0.61
11	Kabupaten Bondowoso	0.56	0.57	0.57
12	Kabupaten Situbondo	0.57	0.58	0.59
13	Kabupaten Probolinggo	0.54	0.55	0.55
14	Kabupaten Pasuruan	0.58	0.59	0.60
15	Kabupaten Sidoarjo	0.76	0.76	0.77
16	Kabupaten Mojokerto	0.63	0.64	0.65
17	Kabupaten Jombang	0.65	0.65	0.66
18	Kabupaten Nganjuk	0.61	0.61	0.62
19	Kabupaten Madiun	0.62	0.63	0.63
20	Kabupaten Magetan	0.65	0.66	0.67
21	Kabupaten Ngawi	0.59	0.59	0.60

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Indeks Pendidikan (%)		
		2019	2020	2021
22	Kabupaten Bojonegoro	0.58	0.59	0.60
23	Kabupaten Tuban	0.57	0.57	0.58
24	Kabupaten Lamongan	0.64	0.64	0.65
25	Kabupaten Gresik	0.69	0.69	0.70
26	Kabupaten Bangkalan	0.51	0.52	0.52
27	Kabupaten Sampang	0.49	0.51	0.51
28	Kabupaten Pamekasan	0.59	0.60	0.60
29	Kabupaten Sumenep	0.55	0.56	0.57
30	Kota Kediri	0.75	0.75	0.76
31	Kota Blitar	0.73	0.73	0.74
32	Kota Malang	0.77	0.77	0.78
33	Kota Probolinggo	0.67	0.67	0.68
34	Kota Pasuruan	0.68	0.68	0.69
35	Kota Mojokerto	0.73	0.73	0.74
36	Kota Madiun	0.77	0.77	0.78
37	Kota Surabaya	0.76	0.76	0.76
38	Kota Batu	0.69	0.69	0.70

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, juga menjelaskan bahwa indeks pendidikan dari kabupaten dan kota Se-Jawa Timur selama periode 2019-2021 memiliki nilai rata-rata 0,63% dengan indeks pendidikan terendah dalam kurun 3 tahun adalah Kabupaten Sampang sebesar 0,49% ditahun 2019 dan indeks pendidikan tertinggi adalah Kota Madiun 0,78% di tahun 2021. Sedangkan, angka standar hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Data Angka Standar Hidup dan IPM Se-Jatim

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	indeks standar hidup (Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah))		
		2019	2020	2021
1	Kabupaten Pacitan	9033	8796	8887
2	Kabupaten Ponorogo	9883	9670	9851
3	Kabupaten Trenggalek	9865	9630	9743

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	indeks standar hidup (Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah))		
		2019	2020	2021
4	Kabupaten Tulungagung	10891	10705	10807
5	Kabupaten Blitar	10861	10654	10757
6	Kabupaten Kediri	11146	11000	11127
7	Kabupaten Malang	10270	10028	10163
8	Kabupaten Lumajang	9274	9088	9203
9	Kabupaten Jember	9525	9294	9410
10	Kabupaten Banyuwangi	12264	12140	12217
11	Kabupaten Bondowoso	10665	10610	10690
12	Kabupaten Situbondo	10097	9857	9996
13	Kabupaten Probolinggo	10972	10859	10969
14	Kabupaten Pasuruan	10381	10164	10297
15	Kabupaten Sidoarjo	14609	14458	14578
16	Kabupaten Mojokerto	12860	12779	12844
17	Kabupaten Jombang	11533	11261	11394
18	Kabupaten Nganjuk	12200	12130	12172
19	Kabupaten Madiun	11650	11574	11658
20	Kabupaten Magetan	11779	11776	11833
21	Kabupaten Ngawi	11468	11418	11459
22	Kabupaten Bojonegoro	10265	10121	10221
23	Kabupaten Tuban	10499	10238	10380
24	Kabupaten Lamongan	11572	11456	11510
25	Kabupaten Gresik	13295	13246	13280
26	Kabupaten Bangkalan	8718	8610	8673
27	Kabupaten Sampang	8760	8739	8790
28	Kabupaten Pamekasan	8834	8739	8804
29	Kabupaten Sumenep	9082	8888	9000
30	Kota Kediri	12440	12239	12359
31	Kota Blitar	13851	13733	13816
32	Kota Malang	16666	16593	16663
33	Kota Probolinggo	12280	12180	12245
34	Kota Pasuruan	13393	13281	13354
35	Kota Mojokerto	13710	13499	13610
36	Kota Madiun	16040	16018	16095
37	Kota Surabaya	17854	17755	17862
38	Kota Batu	12870	12824	12887

Untuk indeks standar hidup yang ditinjau dari jumlah pengeluaran daerah perkapita selama periode 2019-2021 memiliki nilai rata-rata ISH sebesar 11.553 ribuan rupiah dengan indeks standar hidup terendah di periode 2020 oleh Kabupaten Bangkalan sebesar 8.610 ribuan rupiah dan ISH tertinggi selama periode 3 tahun dicapai oleh Kota Surabaya 17.862 ribuan rupiah. Selanjutnya ¹⁰⁷ dari indeks harapan hidup, angka ²³ pendidikan dan standar hidup dapat dilakukan perhitungan indeks pembangunan manusia sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rekap Indeks Pembangunan Manusia Se-Jatim

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Indeks Pembangunan Manusia		
		2019	2020	2021
1	Kabupaten Pacitan	72.59	72.45	73.24
2	Kabupaten Ponorogo	76.36	76.28	76.87
3	Kabupaten Trenggalek	74.95	74.87	75.72
4	Kabupaten Tulungagung	79.76	80.21	80.60
5	Kabupaten Blitar	77.77	77.35	78.16
6	Kabupaten Kediri	79.44	79.55	80.40
7	Kabupaten Malang	76.85	76.30	77.18
8	Kabupaten Lumajang	70.49	70.11	70.97
9	Kabupaten Jember	72.08	72.42	72.86
10	Kabupaten Banyuwangi	79.92	79.71	80.90
11	Kabupaten Bondowoso	73.52	73.96	74.29
12	Kabupaten Situbondo	73.49	73.42	74.33
13	Kabupaten Probolinggo	73.49	73.82	74.22
14	Kabupaten Pasuruan	75.04	74.96	75.82
15	Kabupaten Sidoarjo	93.65	93.36	94.15
16	Kabupaten Mojokerto	83.72	84.05	84.76
17	Kabupaten Jombang	81.52	80.96	81.83
18	Kabupaten Nganjuk	81.01	80.92	81.58
19	Kabupaten Madiun	80.13	80.48	80.83
20	Kabupaten Magetan	82.18	82.65	83.32
21	Kabupaten Ngawi	78.74	78.72	79.40
22	Kabupaten Bojonegoro	75.18	75.38	76.20

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Indeks Pembangunan Manusia		
		2019	2020	2021
23	Kabupaten Tuban	75.27	74.75	75.67
24	Kabupaten Lamongan	81.19	81.00	81.69
25	Kabupaten Gresik	87.33	87.25	87.87
26	Kabupaten Bangkalan	67.80	68.00	68.27
27	Kabupaten Sampang	66.32	67.19	67.43
28	Kabupaten Pamekasan	70.58	70.80	71.10
29	Kabupaten Sumenep	70.86	70.88	71.75
30	Kota Kediri	88.37	87.92	88.72
31	Kota Blitar	90.62	90.47	91.23
32	Kota Malang	97.91	97.86	98.60
33	Kota Probolinggo	83.28	83.11	83.80
34	Kota Pasuruan	86.64	86.47	87.20
35	Kota Mojokerto	90.15	89.76	90.56
36	Kota Madiun	96.50	96.49	97.19
37	Kota Surabaya	100.20	100.03	100.36
38	Kota Batu	86.36	86.31	86.99

Untuk pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten dan kota se-Jawa Timur selama periode 2019-2021 memiliki rata-rata 80,50 dengan pencapaian indeks pembangunan manusia terendah 66,32 oleh Kabupaten Sampang dan pencapaian tertinggi sebesar 100,36 oleh Kota Surabaya. Nilai standar deviasi yang semakin kecil menunjukkan adanya tingkat konsistensi pencapaian nilai dari masing-masing indeks di kabupaten dan kota Se-Jawa Timur selama periode 2019-2021.

2. Deskripsi Data Variabel Rasio Efektifitas (X1) PAD Se-Jatim

Pada penelitian ini variabel bebas adalah rasio keuangan daerah kabupaten dan kota se-Jawa Timur dengan melakukan penilaian tiga rasio keuangan yakni rasio efektifitas (X_1), rasio efisiensi (X_2), dan rasio

pertumbuhan ekonomi (X_3). Berikut ini rekap data deskripsi rasio-rasio dalam menilai rasio keuangan daerah:

Tabel 4.5. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se-Jatim

No	Kabupaten/Kota	2019		2020		2021	
		Angg.	Realisasi	Angg.	Realisasi	Angg.	Realisasi
1	Kabupaten Pacitan	166.32	199.04	194.71	168.46	200.69	211.69
2	Kabupaten Ponorogo	247.54	290.82	295.14	303.33	271.64	376.70
3	Kabupaten Trenggalek	280.17	285.13	302.58	257.98	268.64	233.49
4	Kabupaten Tulungagung	439.53	486.36	446.58	510.55	436.04	953.89
5	Kabupaten Blitar	237.31	285.74	263.66	302.54	284.05	407.53
6	Kabupaten Kediri	391.00	457.76	424.92	494.41	425.69	513.77
7	Kabupaten Malang	525.97	623.81	715.98	583.85	715.98	669.36
8	Kabupaten Lumajang	310.87	296.47	320.54	300.26	307.95	325.05
9	Kabupaten Jember	630.62	667.60	750.02	593.18	716.85	635.31
10	Kabupaten Banyuwangi	571.70	495.69	595.21	482.74	592.74	520.02
11	Kabupaten Bondowoso	193.33	218.54	232.93	222.66	233.31	223.14
12	Kabupaten Situbondo	189.33	204.73	197.10	218.85	212.06	228.77
13	Kabupaten Probolinggo	233.48	245.43	244.68	254.88	241.65	300.40
14	Kabupaten Pasuruan	643.35	650.89	731.16	700.15	724.01	701.20
15	Kabupaten Sidoarjo	1603.00	1689.95	1810.10	1798.52	1609.82	1921.24
16	Kabupaten Mojokerto	501.07	555.00	542.34	537.30	540.12	625.42
17	Kabupaten Jombang	439.13	476.66	467.36	468.63	477.85	665.84
18	Kabupaten Nganjuk	342.77	368.27	367.11	402.35	359.76	478.46
19	Kabupaten Madiun	200.52	229.21	219.45	258.21	220.77	333.15
20	Kabupaten Magetan	192.75	237.38	222.60	203.47	218.92	243.73
21	Kabupaten Ngawi	211.01	255.08	238.29	269.98	242.03	283.61
22	Kabupaten Bojonegoro	482.55	561.25	843.28	720.91	691.31	955.64
23	Kabupaten Tuban	396.86	518.00	564.66	566.08	480.01	614.73
24	Kabupaten Lamongan	503.99	472.00	554.42	481.75	467.69	604.59
25	Kabupaten Gresik	909.91	980.78	1163.67	924.66	1132.30	1031.39
26	Kabupaten Bangkalan	215.94	262.26	261.80	233.18	262.47	271.66
27	Kabupaten Sampang	149.92	168.78	198.96	175.52	228.94	135.50
28	Kabupaten Pamekasan	173.69	219.67	184.41	232.26	194.57	205.97
29	Kabupaten Sumenep	254.49	246.42	266.80	260.33	231.59	252.69
30	Kota Kediri	224.56	266.75	251.28	262.89	272.35	439.90
31	Kota Blitar	173.65	166.14	174.02	174.59	187.33	297.62
32	Kota Malang	533.51	588.07	731.10	491.19	776.69	603.79

No	Kabupaten/Kota	2019		2020		2021	
		Angg.	Realisasi	Angg.	Realisasi	Angg.	Realisasi
33	Kota Probolinggo	175.93	175.78	200.98	183.68	216.83	212.85
34	Kota Pasuruan	139.03	161.71	142.87	145.04	133.36	131.84
35	Kota Mojokerto	205.92	192.70	205.94	231.88	202.83	256.38
36	Kota Madiun	206.49	252.05	235.50	248.94	226.89	265.92
37	Kota Surabaya	5190.30	5381.92	5584.63	4289.96	5561.56	4727.28
38	Kota Batu	153.33	183.72	194.71	168.46	200.00	147.01

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui selama periode 2019-2021 memiliki anggaran pendapatan daerah (PAD) rata-rata di kabupaten dan kota se-Jawa Timur sebesar 532,89 milyar rupiah dengan nilai minimum sebesar 133,36 milyar rupiah dicapai oleh Kota Pasuruan di periode 2021 dan anggaran PAD tertinggi sebesar 5.584,63 milyar rupiah dicapai oleh Kota Surabaya di periode 2020. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2019-2021 memiliki nilai realisasi anggran PAD tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur sebesar 536,38 milyar rupiah dengan pencapaian realisasi terendah sebesar 131,84 milyar rupiah oleh Kota Pasuruan di periode 2021 dan realisasi tertinggi sebesar 5.381,92 milyar rupiah oleh Kota Surabaya di periode 2019. Pencapaian anggran dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota ini akan dijadikan dasar dalam pengukuran rasio efektifitas dan rasio efisiensi dalam penilaian rasio keuangan daerah. Berdasarkan data pendapatan asli daerah dan belanja daerah selama periode 2019-2021 dapat dibuat rekap dara rasi-rasio dalam keuangan daerah sesuai dengan lampiran 2 sebagai berikut:

Tabel 4.6. Rekap Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Se-Jatim

No	Kabupaten dan Kota Se-Jatim	Rasio Efektifitas (%)		
		2019	2020	2021
1	Kabupaten Pacitan	119.67	86.52	105.48
2	Kabupaten Ponorogo	117.48	102.77	138.68
3	Kabupaten Trenggalek	101.77	85.26	86.92
4	Kabupaten Tulungagung	110.65	114.32	218.76
5	Kabupaten Blitar	120.41	114.75	143.47
6	Kabupaten Kediri	117.07	116.35	120.69
7	Kabupaten Malang	118.60	81.55	93.49
8	Kabupaten Lumajang	95.37	93.67	105.55
9	Kabupaten Jember	105.86	79.09	88.63
10	Kabupaten Banyuwangi	86.70	81.10	87.73
11	Kabupaten Bondowoso	113.04	95.59	95.64
12	Kabupaten Situbondo	108.13	111.04	107.88
13	Kabupaten Probolinggo	105.12	104.17	124.31
14	Kabupaten Pasuruan	101,17	95,76	96,85
15	Kabupaten Sidoarjo	105,42	99,36	119,35
16	Kabupaten Mojokerto	110,76	99,07	115,79
17	Kabupaten Jombang	108,55	100,27	139,34
18	Kabupaten Nganjuk	107,44	109,60	132,99
19	Kabupaten Madiun	114,31	117,66	150,90
20	Kabupaten Magetan	123,15	91,41	111,33
21	Kabupaten Ngawi	120,89	113,30	117,18
22	Kabupaten Bojonegoro	116,31	85,49	138,24
23	Kabupaten Tuban	130,52	100,25	128,07
24	Kabupaten Lamongan	93,65	86,89	129,27
25	Kabupaten Gresik	107,79	79,46	91,09
26	Kabupaten Bangkalan	121,45	89,07	103,50
27	Kabupaten Sampang	112,58	88,22	59,19
28	Kabupaten Pamekasan	126,47	125,95	105,86
29	Kabupaten Sumenep	96,83	97,57	109,11
30	Kota Kediri	118,79	104,62	161,52
31	Kota Blitar	95,68	100,33	158,87
32	Kota Malang	110,23	67,19	77,74
33	Kota Probolinggo	99,91	91,39	98,16
34	Kota Pasuruan	116,31	101,52	98,86
35	Kota Mojokerto	93,58	112,60	126,40
36	Kota Madiun	122,06	105,71	117,20

No	Kabupaten dan Kota Se-Jatim	Rasio Efektifitas (%)		
		2019	2020	2021
37	Kota Surabaya	103,69	76,82	85,00
38	Kota Batu	119,82	86,52	73,51
	Rata-rata	110,45	97,16	114,80
	Standar Deviasi	10,35	13,38	29,29
	Minimum	86,70	67,19	59,19
	Maksimum	130,52	125,95	218,76

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan data di atas, diketahui rasio keuangan daerah ditinjau dari nilai rasio efektifitas (X1) periode 2019-2021 memiliki nilai rata-rata 107,47% dengan nilai rasio efektifitas terkecil sebesar 59,19% dari Kabupaten Sampang periode 2021 dan rasio efektifitas keuangan daerah tertinggi 218,76% Kabupaten Tulungagung. Rasio efektifitas di periode 2019 memiliki rata-rata 110,45% dengan nilai efektifitas keuangan daerah terendah sebesar 86,70% dari Kabupaten Banyuwangi dan rasio efektifitas 2019 tertinggi 130,52% dari kabupaten Tuban. Untuk rasio efektifitas periode 2020 memiliki nilai rata-rata sebesar 97,16% dengan nilai terendah 67,19% dicapai kota Malang dan rasio efektifitas keuangan daerah tertinggi 125,95% Kabupaten Pamekasan. Sedangkan selama periode 2021 menunjukkan nilai rata-rata rasio efektifitas keuangan daerah sebesar 114,80% dengan nilai rasio efektifitas 2021 terendah sebesar 59,19% dari Kabupaten Sampang dan nilai rasio efektifitas tertinggi sebesar 218,76% kabupaten Tulungagung.

3. Deskripsi Data Variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2) Se-Jatim

Berdasarkan data pendapatan asli daerah selama periode 2019-2021 dalam rasio keuangan daerah juga dapat diketahui tingkat rasio efisiensi

dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.7. Data Realisasi PAD dan Belanja Daerah Se-Jatim

No	Kabupaten dan Kota	Realisasi PAD			Realisasi Belanja Daerah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pacitan	199.04	168.46	211.69	1921.21	1570.27	1610.28
2	Kabupaten Ponorogo	290.82	303.33	376.70	2419.62	2228.54	2112.62
3	Kabupaten Trenggalek	285.13	257.98	233.49	2025.84	1861.99	1840.13
4	Kabupaten Tulungagung	486.36	510.55	953.89	2609.24	2643.65	2753.99
5	Kabupaten Blitar	285.74	302.54	407.53	2462.29	2282.94	2294.17
6	Kabupaten Kediri	457.76	494.41	513.77	2991.17	2832.28	2937.42
7	Kabupaten Malang	623.81	583.85	669.36	4089.40	3904.35	3873.44
8	Kabupaten Lumajang	296.47	300.26	325.05	2229.23	2028.73	2150.42
9	Kabupaten Jember	667.60	593.18	635.31	3876.91	3297.61	3731.63
10	Kabupaten Banyuwangi	495.69	482.74	520.02	3021.32	3140.64	3093.59
11	Kabupaten Bondowoso	218.54	222.66	223.14	2205.81	1957.38	1963.80
12	Kabupaten Situbondo	204.73	218.85	228.77	1821.89	1696.58	1652.27
13	Kabupaten Probolinggo	245.43	254.88	300.40	2412.87	2302.24	2234.95
14	Kabupaten Pasuruan	650.89	700.15	701.20	3244.33	3238.38	3273.76
15	Kabupaten Sidoarjo	1689.95	1798.52	1921.24	4344.72	4430.66	4936.10
16	Kabupaten Mojokerto	555.00	537.30	625.42	2559.61	2404.90	2443.31
17	Kabupaten Jombang	476.66	468.63	665.84	2653.74	2527.28	2785.98
18	Kabupaten Nganjuk	368.27	402.35	478.46	2542.00	2383.28	2395.34
19	Kabupaten Madiun	229.21	258.21	333.15	1948.31	1796.56	1866.34
20	Kabupaten Magetan	237.38	203.47	243.73	1984.64	1790.37	1773.06
21	Kabupaten Ngawi	255.08	269.98	283.61	2212.05	2146.48	2205.16
22	Kabupaten Bojonegoro	561.25	720.91	955.64	4585.07	4358.62	5086.92
23	Kabupaten Tuban	518.00	566.08	614.73	2554.65	2463.77	2464.98
24	Kabupaten Lamongan	472.00	481.75	604.59	2875.51	2823.14	2871.01
25	Kabupaten Gresik	980.78	924.66	1031.39	2980.71	3095.54	3192.75
26	Kabupaten Bangkalan	262.26	233.18	271.66	2336.78	2116.22	2211.22
27	Kabupaten Sampang	168.78	175.52	135.50	1802.32	1730.65	1836.34
28	Kabupaten Pamekasan	219.67	232.26	205.97	1949.15	2059.12	1978.70
29	Kabupaten Sumenep	246.42	260.33	252.69	2323.12	2544.77	2390.69
30	Kota Kediri	266.75	262.89	439.90	1312.91	1207.69	1344.27
31	Kota Blitar	166.14	174.59	297.62	974.73	868.06	986.00
32	Kota Malang	588.07	491.19	603.79	1909.78	2103.47	2225.95
33	Kota Probolinggo	175.78	183.68	212.85	1058.97	877.67	898.56
34	Kota Pasuruan	161.71	145.04	131.84	862.29	824.82	858.58

No	Kabupaten dan Kota	Realisasi PAD			Realisasi Belanja Daerah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
35	Kota Mojokerto	192.70	231.88	256.38	852.08	804.41	953.45
36	Kota Madiun	252.05	248.94	265.92	1148.50	1014.63	1073.68
37	Kota Surabaya	5381.92	4289.96	4727.28	9162.66	8032.68	7819.08
38	Kota Batu	183.72	168.46	147.01	946.96	1570.27	989.97

²¹ Berdasarkan tabel 4.2 di atas juga dapat diketahui bahwa dalam rasio keuangan daerah diperlukan deskripsi belanja daerah selama periode pengamatan 2019-2021. Hasil rekap data anggaran belanja daerah menunjukkan selama periode 2019-2021 memiliki nilai rata-rata anggaran belanja daerah sebesar 2.688,41 milyar rupiah dengan nilai anggaran belanja daerah sebesar 960,46 dari Kota Blitar periode 2021 dan nilai anggaran daerah terbesar sebesar 10.322,23 milyar rupiah dari Kota Surabaya periode 2020. Sedangkan dalam data realisasi belanja daerah selama periode 2019-2021 memiliki rata-rata sebesar 2.449,85 milyar rupiah dengan realisasi belanja daerah terendah sebesar 804.41 milyar rupiah dan realisasi belanja daerah tertinggi sebesar 9162.66 milyar rupiah oleh Kota Surabaya periode 2019. Berikut ini rasio efisiensi kabupaten dan kota se-Jawa Timur selama periode 2019-2021:

Tabel 4.8. Rekap Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Se-Jatim

Kabupaten dan Kota Se-Jatim	Rasio Efisiensi (%)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	965,24	932,13	760,68
Kabupaten Ponorogo	832,00	734,69	560,82
Kabupaten Trenggalek	710,50	721,76	788,10
Kabupaten Tulungagung	536,48	517,80	288,71
Kabupaten Blitar	861,72	754,59	562,95
Kabupaten Kediri	653,44	572,86	571,74
Kabupaten Malang	655,55	668,72	578,68

Kabupaten dan Kota Se-Jatim	Rasio Efisiensi (%)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Lumajang	751,92	675,66	661,57
Kabupaten Jember	580,72	555,92	587,37
Kabupaten Banyuwangi	609,52	650,59	594,90
Kabupaten Bondowoso	1009,34	879,09	880,08
Kabupaten Situbondo	889,90	775,23	722,24
Kabupaten Probolinggo	983,12	903,26	743,99
Kabupaten Pasuruan	498,45	462,53	466,88
Kabupaten Sidoarjo	257,09	246,35	256,92
Kabupaten Mojokerto	461,19	447,59	390,67
Kabupaten Jombang	556,74	539,29	418,42
Kabupaten Nganjuk	690,25	592,34	500,64
Kabupaten Madiun	850,01	695,77	560,21
Kabupaten Magetan	836,06	879,92	727,47
Kabupaten Ngawi	867,20	795,05	777,53
Kabupaten Bojonegoro	816,94	604,60	532,31
Kabupaten Tuban	493,18	435,23	400,99
Kabupaten Lamongan	609,22	586,02	474,87
Kabupaten Gresik	303,91	334,78	309,56
Kabupaten Bangkalan	891,02	907,55	813,97
Kabupaten Sampang	1067,85	986,01	1355,23
Kabupaten Pamekasan	887,31	886,56	960,67
Kabupaten Sumenep	942,75	977,52	946,10
Kota Kediri	492,19	459,39	305,59
Kota Blitar	586,69	497,20	331,29
Kota Malang	324,75	428,24	368,66
Kota Probolinggo	602,44	477,83	422,16
Kota Pasuruan	533,23	568,68	651,23
Kota Mojokerto	442,18	346,91	371,89
Kota Madiun	455,66	407,58	403,76
Kota Surabaya	170,25	187,24	165,40
Kota Batu	515,44	932,13	673,40
Rata-rata	662,93	632,23	575,99
Standar Deviasi	225,15	212,49	236,62
Minimum	170,25	187,24	165,40
Maksimum	1067,85	986,01	1355,23

Berdasarkan data di atas, dari ³⁷ 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur

dapat diketahui pencapaian dalam tingkat rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah dihitung persentase dari perbandingan PAD periode tahun berjalan dengan PAD periode sebelumnya, semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan kriteria sangat efisien. Pada periode 2019 memiliki nilai efisiensi rata-rata 662,93% dengan nilai efisiensi keuangan daerah terendah sebesar 170,25% Kota Surabaya dan nilai rasio efisiensi tertinggi sebesar 1.067,85%. Untuk periode 2020 memiliki nilai rata-rata efisiensi keuangan daerah sebesar 632,23% dengan rasio efisiensi terendah sebesar 187,24% kota Surabaya dan rasio efisiensi tertinggi sebesar 986,01% dari Kabupaten Sampang. Sedangkan selama periode 2021 memiliki nilai rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 575,99% dengan nilai efisiensi terendah sebesar 165,40% dicapai oleh Kota Surabaya dan nilai efisiensi tertinggi sebesar 1355,23% Kabupaten Sampang. Berdasarkan data tersebut secara keseluruhan selama periode 2019-2021 memiliki nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 623,72% dengan standar deviasi 225,88% dan nilai rasio efisiensi terendah selama 3 periode sebesar 165,40% Kota Surabaya dan selama 3 periode memiliki rasio efisiensi tertinggi 1355,23% Kabupaten Sampang.

4. Deskripsi Data Variabel Rasio Pertumbuhan PAD (X_3) Se-Jatim

Berdasarkan data realisasi dan anggaran belanja daerah kabupaten dan kota se-Jawa Timur dapat dilakukan perhitungan rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut:

Tabel 4.9. Rekap Rasio Pertumbuhan PAD Se-Jatim

Kabupaten dan Kota Se-Jatim	Rasio Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	7,50	-15,36	25,66
Kabupaten Ponorogo	0,62	4,30	24,19
Kabupaten Trenggalek	21,95	-9,52	-9,49
Kabupaten Tulungagung	7,33	4,97	86,84
Kabupaten Blitar	13,19	5,88	34,70
Kabupaten Kediri	-4,02	8,01	3,92
Kabupaten Malang	6,58	-6,41	14,65
Kabupaten Lumajang	9,73	1,28	8,26
Kabupaten Jember	11,73	-11,15	7,10
Kabupaten Banyuwangi	10,14	-2,61	7,72
Kabupaten Bondowoso	7,53	1,89	0,22
Kabupaten Situbondo	9,31	6,90	4,53
Kabupaten Probolinggo	4,67	3,85	17,86
Kabupaten Pasuruan	5,96	7,57	0,15
Kabupaten Sidoarjo	0,26	6,42	6,82
Kabupaten Mojokerto	1,59	-3,19	16,40
Kabupaten Jombang	8,78	-1,68	42,08
Kabupaten Nganjuk	1,85	9,25	18,92
Kabupaten Madiun	4,64	12,65	29,02
Kabupaten Magetan	20,60	-14,29	19,79
Kabupaten Ngawi	13,94	5,84	5,05
Kabupaten Bojonegoro	32,01	28,45	32,56
Kabupaten Tuban	17,05	9,28	8,59
Kabupaten Lamongan	8,11	2,07	25,50
Kabupaten Gresik	2,46	-5,72	11,54
Kabupaten Bangkalan	31,62	-11,09	16,50
Kabupaten Sampang	24,70	3,99	-22,80
Kabupaten Pamekasan	-1,23	5,73	-11,32
Kabupaten Sumenep	32,61	5,64	-2,93
Kota Kediri	7,09	-1,45	67,33
Kota Blitar	1,91	5,09	70,47
Kota Malang	5,60	-16,47	22,92
Kota Probolinggo	-0,01	4,49	15,88
Kota Pasuruan	5,67	-10,31	-9,10
Kota Mojokerto	5,58	20,33	10,57

Kabupaten dan Kota Se-Jatim	Rasio Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2019	2020	2021
Kota Madiun	9,18	-1,23	6,82
Kota Surabaya	8,23	-20,29	10,19
Kota Batu	13,01	-8,31	-12,73
Rata-rata	9,67	0,65	15,90
Standar Deviasi	9,10	10,06	22,39
Minimum	-4,02	-20,29	-22,80
Maksimum	32,61	28,45	86,84

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa selama periode 2019 memiliki rata-rata rasio pertumbuhan PAD sebesar 9,67% dengan rasio pertumbuhan -4,02% oleh Kabupaten Kediri dan rasio pertumbuhan ekonomi tertinggi 32,61% oleh Kabupaten Sumenep. Pada periode 2020 di kabupaten dan kota se-Jatim memiliki nilai rasio pertumbuhan PAD rata-rata sebesar 0,65% dengan nilai rasio terendah sebesar -20,29% oleh Kota Surabaya dan rasio pertumbuhan PAD tertinggi sebesar 28,45% Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan, periode 2021 memiliki rasio pertumbuhan PAD rata-rata sebesar 15,90% dengan nilai pertumbuhan terendah sebesar -22,80% Kabupaten Sampang dan rasio pertumbuhan PAD tertinggi 86,84% Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui selama 3 tahun periode 2019-2021 memiliki rasio pertumbuhan PAD kabupaten dan kota se-Jatim sebesar 8,74% dengan rasio terendah kabupaten Sampang di periode 2021 dan rasio tertinggi oleh Kabupaten Tulungagung di periode 2021.

C. Analisis Data

1. Model Estimasi Regresi Data Panel

Pada penelitian ini digunakan analisis pemilihan model estimasi dengan

3 cara dalam menentukan model mana yang memiliki efisiensi dan konsistensi sampel dalam memprediksi hasil yang juga berlaku secara konsisten mewakili populasi. Peneliti melakukan tranformasi data variabel Y dengan alasan untuk menyamakan bentuk data dalam memenuhi distribusi normal dan variabel Y awal sebelumnya bukan dalam bentuk rasio seperti variabel independen rasio keuangan. Berikut ini model estimasi yang diperoleh dari *software Eviews versi 12* :

a. *Common Effect Model*

Berikut ini hasil model CEM dengan pendekatan model data panel yang hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* serta tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Berikut hasil model CEM hasil e-views:

Tabel 4.10. Model CEM

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.606668	0.047093	97.82135	0.0000
X1	8.95E-05	0.000435	0.205768	0.8374
X2	-0.000359	2.72E-05	-13.18406	0.0000
X3	-0.001126	0.000566	-1.988569	0.0492
Root MSE	0.062297	R-squared		0.612523
Mean dependent var	4.383094	Adjusted R-squared		0.601956
S.D. dependent var	0.100521	S.E. of regression		0.063420
Akaike info criterion	-2.643627	Sum squared resid		0.442427
Schwarz criterion	-2.547620	Log likelihood		154.6867
Hannan-Quinn criter.	-2.604663	F-statistic		57.96264
Durbin-Watson stat	0.308719	Prob(F-statistic)		0.000000

Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel dengan model estimasi CEM sesuai dengan output tabel 4.10 di atas, maka dapat dibentuk persamaan model estimasi analisis regresi data panel CEM sebagai berikut:

$$\text{CEM: Ln Y} = 4.606668 + 0.000090X_{1it} - 0.000359X_{2it} - 0.001126X_{3it}$$

Berdasarkan tabel 4.10 hasil model CEM memiliki nilai *probability* $F = 0.000 < 0.005$ dan nilai R-square sebesar $0.612523 = 61,25\%$. Hasil uji parsial model CEM menunjukkan variabel-variabel yang memenuhi hipotesis signifikansi hanya variabel rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD yang mampu mempengaruhi variabel indeks pembangunan manusia (Y).

b. *Fixed Effect Model*

Model kedua yang peneliti analisis adalah *Fixed Effect Model* (FEM) memiliki persamaan yang tidak konstan data *cross section* dan koefisien dari regresi tidak berbeda pada setiap individu dan waktu. Berikut hasil model FEM dari data penelitian dengan melakukan tranformasi nilai Y:

Tabel 4.11. Model FEM

Dependent Variabel: LN_Y Method: Panel Least Squares Sample: 2019 2021 Periods included: 3 Cross-sections included: 38 Total panel (balanced) observations: 114				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.391672	0.009220	476.2946	0.0000
X1	2.25E-05	6.16E-05	0.365495	0.7158
X2	-1.79E-05	9.22E-06	-1.936526	0.0567
X3	1.17E-05	7.30E-05	0.160247	0.8731

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variabels)			
Root MSE	0.004626	R-squared	0.997864
Mean dependent var	4.383094	Adjusted R-squared	0.996693
S.D. dependent var	0.100521	S.E. of regression	0.005780
Akaike info criterion	-7.195160	Sum squared resid	0.002439
Schwarz criterion	-6.211089	Log likelihood	451.1241
Hannan-Quinn criter.	-6.795781	F-statistic	852.5205
Durbin-Watson stat	2.907274	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel dengan model estimasi FEM sesuai dengan *output* tabel 4.11 di atas, maka dapat dibentuk persamaan model estimasi analisis regresi data panel FEM sebagai berikut:

$$\text{FEM: LnY} = 4.391672 + 0.0000225X_{1it} - 0.0000179X_{2it} + 0.0000117X_{3it}$$

Berdasarkan model FEM diperoleh nilai *probability F-Statistic* = 0.000 < 0.05 dan nilai *R-square* = 0,9997864 yang hampir mendekati 1 dengan nilai determinasi sangat baik. Hasil model FEM menunjukkan 3 variabel Independen yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

c. Random Effect Model

Random Effect Model (REM) Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan *intersept* diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan.

Tabel 4.12. Model REM

Dependent Variabel: LN_Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2019 2021
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114
Swamy and Arora estimator of component variances

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.401600	0.013519	325.5965	0.0000
X1	9.90E-06	6.15E-05	0.161171	0.8723
X2	-3.12E-05	9.05E-06	-3.442286	0.0008
X3	-2.11E-05	7.28E-05	-0.290522	0.7720
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.061555	0.9913
Idiosyncratic random			0.005780	0.0087
Weighted Statistics				
Root MSE	0.006950	R-squared		0.096350
Mean dependent var	0.237286	Adjusted R-squared		0.071705
S.D. dependent var	0.007344	S.E. of regression		0.007076
Sum squared resid	0.005507	F-statistic		3.909494
Durbin-Watson stat	1.398581	Prob(F-statistic)		0.010720
Unweighted Statistics				
R-squared	0.101829	Mean dependent var		4.383094
Sum squared resid	1.025545	Durbin-Watson stat		0.007510

Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel dengan model estimasi REM sesuai dengan output tabel 4.12 di atas, maka dapat dibentuk persamaan model estimasi analisis regresi data panel REM sebagai berikut:

$$\text{REM: } \ln Y = 4.4016 + 0.0000099X1_{it} - 0.0000312X2_{it} - 0.0000211X3_{it}$$

Berdasarkan model REM diperoleh nilai *probability F-Statistic* = 0.010720 < 0.05 dan nilai R-square = 0,96350 dengan nilai determinasi sedang. Hasil model REM menunjukkan 2 variabel Independen rasio efektifitas PAD dan pertumbuhan PAD yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Y. Sedangkan, rasio efisiensi keuangan daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

2. Hasil Penentuan Model Estimasi

a. Uji Chow

Untuk menentukan menggunakan model yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) dilakukan uji chow. Berikut ini hasil uji chow dari eviews:

Tabel 4.13. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	394.126464	(37,73)	0.0000
Cross-section Chi-square	604.442108	37	0.0000

Berdasarkan uji Chow hasil diatas, maka nilai probabilitas *Cross Section F* dan Chi Square lebih kecil dari Alpha 0.05. Sehingga model yang lebih baik digunakan adalah model dengan FEM. Maka uji selanjutnya adalah Uji Hausman.

b. Uji Hausman

Berikut uji perbandingan model FEM dengan REM yang dibantukan dengan E-Views versi 12:

Tabel 4.14. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57.818225	3	0.0000

Berdasarkan nilai *Cross-section random* menunjukkan nilai 0.000 <

0.05, maka terima H1 yang berarti metode terbaik yang harus digunakan adalah *fixed effect* dari pada *random effect*. Kemudian kita lanjutkan dengan uji Lagrangian Multiplier.

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Untuk tetap menentukan pilihan pada *fixed effect* atau *common effect* atau *random effect* juga dilakukan uji *Lagrange multiplier* sebagai berikut:

Tabel 4.15. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

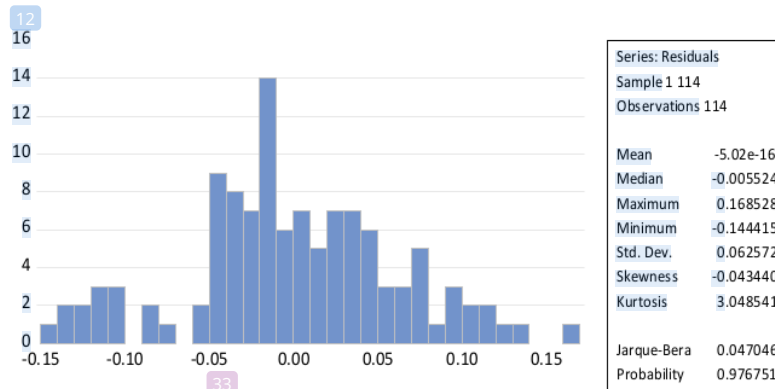
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	78.85000 (0.0000)	0.041266 (0.8390)	78.89126 (0.0000)
Honda	8.879752 (0.0000)	-0.203139 (0.5805)	6.135292 (0.0000)
King-Wu	8.879752 (0.0000)	-0.203139 (0.5805)	1.813006 (0.0349)
Standardized Honda	9.206927 (0.0000)	0.333219 (0.3695)	2.306235 (0.0105)
Standardized King-Wu	9.206927 (0.0000)	0.333219 (0.3695)	-0.142884 (0.5568)
Gourieroux, et al.	--	--	78.85000 (0.0000)

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai Breusch-Pagan memiliki nilai *probability* = 0.000 < 0.05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi dari uji LM, model terbaik yang digunakan adalah model dengan menggunakan *Fix Effect Model* (FEM). Berdasarkan uji *Chow*, Hausman dan LM maka terpilih model *Fix Effect Model* (FEM).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan data penelitian pengaruh rasio keuangan diamati dari rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) se-Jawa Timur ditetapkan mode *fixed effect* model. Berdasarkan model regresi tersebut, maka dilakukan uji normalitas *Jarque-bera* dengan E-Views 12.0 sebagai berikut:



Gambar 4.2 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas residual dari grafik diatas menunjukkan nilai jarque-bera sebesar 0.047046 dengan *p-value* sebesar 0.976751 dimana lebih dari 0.05 sehingga berarti residual berdistribusi normal. Sehingga model regresi dari *fixed effect model* dapat digunakan sebagai uji hipotesis.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data panel ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independent.

Tabel 4.16. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.164484	0.750546
X2	-0.164484	1.000000	-0.218075
X3	0.750546	-0.218075	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai korelasi variabel kurang dari 0.90 (Ghozali, 2018:83) sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas.

c. Uji Autokorelasi

Peneliti menggunakan uji autokorelasi dengan LM test uji *Breusch-Godfrey* (BG test), karena data lebih dari 100 unit data satuan.

Tabel 4.17. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	59.17435	Prob. F(2,108)		0.0000
Obs*R-squared	59.60605	Prob. Chi-Square(2)		0.0000
Test Equation:				
Dependent Variabel: RESID				
Method: Least Squares				
Sample: 1 114				
Included observations: 114				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.239699	2.727299	0.087889	0.9301
X1	-0.014644	0.025231	-0.580392	0.5629
X2	0.001892	0.001588	1.191986	0.2359
X3	0.024282	0.032993	0.735993	0.4633
RESID(-1)	0.635688	0.096456	6.590458	0.0000
RESID(-2)	0.133073	0.100292	1.326858	0.1874
R-squared	0.522860	Mean dependent var		-1.37E-14
Adjusted R-squared	0.500770	S.D. dependent var		5.195851
S.E. of regression	3.671191	Akaike info criterion		5.490105
Sum squared resid	1455.585	Schwarz criterion		5.634115
Log likelihood	-306.9360	Hannan-Quinn criter.		5.548551
F-statistic	23.66974	Durbin-Watson stat		1.895237
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan tabel di atas nilai *probability Chi Square* (Obs R-

squared) sebesar 0.000 < 0.05 maka terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi data panel dengan *fixed effect model*. Model regresi data panel yang baik adalah yang bebas dari masalah autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas dalam regresi data panel model *fixed effect* dalam penelitian ini:

Tabel 4.18. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.756848	Prob. F(3,110)	0.1597
Obs*R-squared	5.212450	Prob. Chi-Square(3)	0.1569
Scaled explained SS	4.970867	Prob. Chi-Square(3)	0.1739

Hipotesis nol (H_0) dari uji *chi-squared* pada penelitian ini adalah tidak ada heteroskedastisitas (homoskedastik) di model regresi data panel, dan hipotesis alternatifnya (H_a) adalah adanya gejala heteroskedastisitas di model regresi yang dihasilkan. Berdasar nilai *p-value* = 0,1569 yang lebih besar dari α (0,05) berarti kita tidak menolak H_0 yang menyatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang diuji. Dengan demikian berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas residual asumsi model regresi data panel yang tidak membolehkan adanya heteroskedastisitas terpenuhi berdasarkan tabel di atas nilai probability *Chi Square (Obs R-squared)* sebesar 0.1569 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan model estimasi FEM yang sesuai dan memenuhi syarat, maka dalam penelitian ini dapat dibuat model persamaan analisis regresi data panel dari hasil uji regresi data panel sebagai berikut:

Tabel 4.19. Model Persamaan Regresi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.391672	0.009220	476.2946	0.0000
X1	2.25E-05	6.16E-05	0.365495	0.7158
X2	-1.79E-05	9.22E-06	-1.936526	0.0567
X3	1.17E-05	7.30E-05	0.160247	0.8731

Berdasarkan tabel 4.19 tersebut, maka dapat dibuat model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{FEM: LnY} = 4.391672 + 0.0000225X_{1it} - 0.0000179X_{2it} + 0.0000117X_{3it}$$

5. Koefisien Determinasi

Berdasarkan mode estimasi FEM dapat diketahui besarnya koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.20. Model Persamaan Regresi

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variabls)			
Root MSE	0.365092	R-squared	0.998035
Mean dependent var	80.49316	Adjusted R-squared	0.996958
S.D. dependent var	8.272393	S.E. of regression	0.456240
Akaike info criterion	1.541962	Sum squared resid	15.19528
Schwarz criterion	2.526033	Log likelihood	-46.89183
Hannan-Quinn criter.	1.941341	F-statistic	926.9165
Durbin-Watson stat	2.934707	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, maka dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi dari permasamaan regresi yang terbentuk dari variabel tingkat efektifitas PAD, efisiensi keuangan daerah dan pertumbuhan

PAD terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh nilai *Adjusted R-squared* = 0.996958 atau 99,69%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan daerah dapat mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 99,69%, sisanya 0,31% dipengaruhi variabel lain yang belum dapat peneliti amati.

D. Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Parsial

Berdasarkan hasil uji model estimasi yang memiliki nilai koefisien determinasi paling besar dan probabiliti atau tingkat kesalahan paling kecil yang membuat model *fixed effect model* (FEM) yang palik efektif dan memenuhi distribusi normal dalam menentukan uji hipotesis. Berikut hasil uji parsial regresi data panel dari model FEM:

Tabel 4.21. Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variabel: LN_Y Method: Panel Least Squares Sample: 2019 2021 Periods included: 3 Cross-sections included: 38 Total panel (balanced) observations: 114				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.391672	0.009220	476.2946	0.0000
X1	2.25E-05	6.16E-05	0.365495	0.7158
X2	-1.79E-05	9.22E-06	-1.936526	0.0567
X3	1.17E-05	7.30E-05	0.160247	0.8731
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variabls)				
Root MSE	0.004626	R-squared	0.997864	
Mean dependent var	4.383094	Adjusted R-squared	0.996693	
S.D. dependent var	0.100521	S.E. of regression	0.005780	
Akaike info criterion	-7.195160	Sum squared resid	0.002439	
Schwarz criterion	-6.211089	Log likelihood	451.1241	
Hannan-Quinn criter.	-6.795781	F-statistic	852.5205	
Durbin-Watson stat	2.907274	Prob(F-statistic)	0.000000	

⁴ Berdasarkan hasil uji t-test regresi data panel dengan *fixed effect model* ³⁷ dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t-test ¹¹⁹ menunjukkan nilai t-hitung = 0.365495 < t-tabel = 1.28922 (df= n-k = 114-3=111;0.05) dan nilai *p-value* = 0.7158 > ²⁹ 0.05 yang berarti bahwa H₁ ditolak dan H₀ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tidak terbukti rasio efektifitas PAD berpengaruh signifikan ³⁵ terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota Se-Jawa Timur selama periode 2019-2021.
2. Berdasarkan hasil uji t-test ⁷² menunjukkan nilai t-hitung = -1.936526 < t-tabel = 1.28922 (df= n-k = 114-3=111;0.05) dan nilai *p-value* = 0.0567 > ²⁹ 0.05 yang berarti bahwa H₁ ditolak dan H₀ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tidak terbukti rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota Se-Jawa Timur selama periode 2019-2021.
3. Berdasarkan hasil uji t-test ⁷² menunjukkan nilai t-hitung = -1.936526 < t-tabel = 1.28922 (df= n-k = 114-3=111;0.05) dan nilai *p-value* = 0.0567 > 0.05 yang berarti bahwa H₁ ¹ ditolak dan H₀ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tidak terbukti tingkat pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota Se-Jawa Timur selama periode 2019-2021.

2. Hasil Uji Simultan

Berdasarkan hasil regresi PLS *fixed model* ⁹⁸ tabel 4.15 di atas menunjukkan nilai F-hitung = 852.5205 > F-tabel = 2,69 (df₁ = 110:3:0.05)

dan nilai $p\text{-value} = 0.000000 < 0.05$, yang berarti bahwa H_4 diterima. Sehingga terbukti secara simultan tingkat rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten Kota Se-Jawa Timur. Bersarnya nilai $R\text{-square} = 0.997864$ atau 99,% menunjukkan besarnya distribusi adanya variabel rasio keuangan daerah di kabupaten dan kota se-Jawa Timur dapat mempengaruhi indeks pertumbuhan daerah.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Rasio Efektifitas PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t-test melalui hasil persamaan linier regresi *fixed effect model* bahwa tingkat rasio efektifitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten an kota se-Jawa Timur selama periode 2019-2021. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t-hitung = $0.365495 < t\text{-tabel} = 1.28922$ ($df = n - k = 114 - 3 = 111; 0.05$) dan nilai $p\text{-value} = 0.7158 > 0.05$ yang berarti bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Adanya rasio efektifitas PAD memberikan dampak positif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota Se-Jawa Timur selama periode 2019-2021. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun tidak secara signifikan tingkat rasio efektifitas PAD kabupaten dan kota di Jawa Timur akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian sejalan dengan Harliyani, dkk (2016) menunjukkan bahwa rasio efektifitas PAD dan rasio efisiensi PAD tidak signifikan

berpengaruh terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD yang melebihi target penerimaan yang ditetapkan tidak dapat mempengaruhi peningkatan angka harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup yang merupakan indikasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, IPM sebagai gambaran keberhasilan pemerintah dalam pengadaan layanan publik seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan pemberian modal masyarakat juga tidak akan terpengaruh menjadi meningkat seiring adanya peningkatan PAD yang diterima pemerintah. Sedangkan, Evelyn, dkk (2018) juga menjelaskan hal yang sama bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur selama periode.

Hasil *fixed effect model* menunjukkan tingkat rasio efektifitas memiliki koefisien regresi bernilai positif 0.0000225. Hal ini menunjukkan bahwa adanya anggaran dan realisasi pendapatan daerah yang besar tidak berpengaruh dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Besarnya realisasi PAD yang diterima kabupaten dan Kota Jawa Timur belum dapat merata dalam membantu meningkatkan angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan juga belum mampu meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Sehingga peningkatan PAD tidak selalu sebanding dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena seharusnya dengan adanya PAD juga harus dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan penyaluran PAD kepada masyarakat. Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan

desentralisasi fiskal suatu daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik, pemerintahan daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan menggali potensi penerimaan secara mandiri dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan rasio efektivitas PAD penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pengaruh Tingkat Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t-test dari model *fixed effect model* menunjukkan bahwa menunjukkan tingkat rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten an kota se-Jawa Timur selama periode 2019-2021. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t-hitung = $-1.936526 < t\text{-tabel} = 1.28922$ ($df = n - k = 114 - 3 = 111; 0.05$) dan nilai *p-value* = $0.0567 > 0.05$ yang berarti bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tidak terbukti rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota Se-Jawa Timur selama periode 2019-2021.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Evlyn, dkk (2018) yang juga menunjukkan efisiensi PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM. Begitu juga penelitian Taslim, dkk (2018) juga menunjukkan hal yang sama bahwa, rasio efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Adanya koefisien determinasi yang negatif

dan tidak signifikan dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat rasio efisiensi keuangan daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyat.

Pada penelitian ini juga menunjukkan hal yang sama dengan teori peneliti terdahulu. Hasil uji *fixed effect model* juga menunjukkan koefisien determinasi tingkat rasio efisiensi keuangan daerah adalah -0.0000179. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin rendah rasio efisiensi biaya pungut PAD terhadap realisasi PAD tidak dapat mempengaruhi adanya peningkatan indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya realisasi PAD dan aktivitas belanja daerah di kabupaten dan kota `Jawa Timur belum dapat mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi. Semakin rendah nilai efisiensi semakin baik kinerja keuangan daerah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa realisasi PAD dan Belanja daerah belum dapat berperan dalam pembangunan manusia atau belum dapat langsung dirasakan oleh masyarakat untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat secara merata.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal disuatu daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik, pemerintahan daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan menggali potensi penerimaan secara mandiri dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan keefektifan penyelenggaraan

pemerintahan. Rasio Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Tercapainya pemerintahan yang efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% hal tersebut berarti semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t-test dari model *fixed effect model* menunjukkan bahwa menunjukkan tingkat pertumbuhan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten an kota se-Jawa Timur selama periode 2019-2021. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t-hitung = -1.936526 < t-tabel = 1.28922 (df= n-k = 114-3=111;0.05) dan nilai *p-value* = 0.0567 > 0.05 yang berarti bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tidak terbukti tingkat pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten dan kota Se-Jawa Timur selama periode 2019-2021.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Maulin, dkk (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tetapi penelitian ini sejalan Nainggolan (2021) yang juga membuktikan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai

dengan pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Disini distribusi pendapatan juga menjadi salah satu hal penting. Distribusi pendapatan yang baik membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dikarenakan dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja.

Peneliti juga menunjukkan bahwa hasil statistik ⁸⁸ memiliki nilai koefisien regresi yang positif 0.0000117. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pertumbuhan ekonomi yang juga merupakan penerimaan PAD dengan belanja daerah yang tidak mampu berpengaruh dalam meningkatkan ⁸⁷ secara signifikan nilai indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sehingga agar dapat signifikan indeks pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan, pemerintah perlu memaksimal PAD dalam pembangunan bukan hanya menggunakan dalam belanja daerah yang bukan beterkaitan dengan rakyat.

4. Pengaruh Tingkat Rasio Efektifitas PAD, Efisiensi ³ Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan *fixed effect model* membuktikan secara simultan rasio ¹⁰ keuangan yang diukur dengan tingkat rasio efektifitas PAD, efisiensi euangan daerah dan pertumbuhan PAD berpengaruh ⁵³ secara simultan dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota Jawa Timur

selama periode 2019-2021. Hal ini dibuktikan dengan nilai F -hitung = 852.5205 > F -tabel = 2,69 ($df_1 = 110:3:0.05$) dan nilai p -value = 0.000000 < 0.05, yang berarti bahwa H_4 diterima. Sehingga terbukti secara simultan tingkat rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten Kota Se-Jawa Timur. Bersarnya nilai $Adjusted R-squared$ = 0.996958 atau 99,69% menunjukkan besarnya distribusi adanya variabel rasio keuangan daerah di kabupaten dan kota se-Jawa Timur dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan 0.31% dipengaruhi oleh variabel diluar model regresi.

Pemerintah harus mampu menyeimbangkan adanya penerimaan dengan dana pembangunan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mampu mengurangi kesenjangan dimasyarakat dan benar-benar harus memanfaatkan PAD yang diperoleh dari sektor-sektor pembangunan dalam 11 sektor Indonesia dalam membuka peluang kerja yang semakin besar.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data maka dapat disimpulkan dari penelitian ini membuktikan:

1. Tingkat rasio efektivitas PAD secara parsial tidak mampu berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Tingkat rasio efisiensi keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
3. Indeks pertumbuhan PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Tingkat rasio efektivitas PAD, tingkat rasio efisiensi keuangan daerah, dan pertumbuhan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa rekomendasi yang dapat peneliti kontribusikan adalah:

1. Adanya tingkat rasio efektifitas antara anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah diharapkan dapat berperan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan pembangu

ekonomi secara signifikan dan tepat sasaran.

2. Pemerintah daerah harus mampu meminimalkan belanja daerah dan lebih menggunakan dana pemerintah dalam membantu kesejahteraan masyarakat dengan menalurkan pendapatan asli daerah dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat seperti dengan meningkatkan pembiayaan UMKM daripada meningkatkan fasilitas dilingkungan pegawai.
3. Diharapkan pemerintah dan sektor-sektor perekonomian mampu berperan aktif dalam meningkatkan ¹¹⁷pendapatan asli daerah (PAD) sebagai indikator ¹¹⁶pertumbuhan ekonomi yang dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya indikasi peningkata indeks pembangunan masusia (IPM).

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2015). *Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Andriyani, Devi., Munandar dan Fuadi, (2020). Analisis Efisiensi Teknis Industri Perabot di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan Data Envelopment Analysis (DEA) Method. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*,4(2), 2020, 138-145. <http://journal.lembagakita.org>
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 02(03), 85-98. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI9qeCh5PsAhU263MBHb7eB7AQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fjournal.unnes.ac.id%2Fsju%2Findex.php%2Fedaj%2Farticle%2Fview%2F1984%2F1785&usg=AOvVaw2vU_OmLVRQGGP5_I3xI28V
- Eka Marisca Harliyani dan Haryadi, (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 3, Januari-Maret 2016 ISSN: 2338-4603*
- Evlyn, Mahardika. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.
- Fadli Ali Taslim, dkk (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara". Vol. 4 No. 2 (2021): FairValue : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i2.647>
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Analisis Kritis atas laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan ke sepuluh. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 56-66. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216>
- Jumingan. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu*. Jakarta: PT RajaGrafindo. Persada.
- Kasmir. 2017. *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*. PT Raja. Grafindo Persada: Jakarta.
- Munfarida, Siti dkk (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks

- Pembangunan Manusia. AMAR (Andalas Management Review) Vol. 4, No. 2 (2020) 46-59 The Management Institute, Faculty of Economics, Universitas Andalas ISSN 2476-9282
- Sari, Febri Nurgita dan Riharjo (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 9 No 8.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.

Lampiran 1. Data Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (Y) Sejatim Periode 2019-2021

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Angka Harapan Hidup (%)			Indeks Pendidikan (%)			Indeks Standar Hidup (Ribu Rupiah)			Indeks Pembangunan Manusia (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pacitan	71.77	72.07	72.48	0.59	0.60	0.61	9033	8796	8887	72.59	72.45	73.24
2	Kabupaten Ponorogo	72.65	72.85	73.20	0.62	0.63	0.63	9883	9670	9851	76.36	76.28	76.87
3	Kabupaten Trenggalek	73.59	73.86	74.26	0.58	0.59	0.60	9865	9630	9743	74.95	74.87	75.72
4	Kabupaten Tulungagung	73.95	74.16	74.54	0.63	0.65	0.65	10891	10705	10807	79.76	80.21	80.60
5	Kabupaten Blitar	73.39	73.61	73.98	0.59	0.59	0.60	10861	10654	10757	77.77	77.35	78.16
6	Kabupaten Kediri	72.54	72.65	72.97	0.62	0.63	0.64	11146	11000	11127	79.44	79.55	80.40
7	Kabupaten Malang	72.45	72.61	72.95	0.61	0.61	0.62	10270	10028	10163	76.85	76.30	77.18
8	Kabupaten Lumajang	69.94	70.21	70.61	0.54	0.54	0.55	9274	9088	9203	70.49	70.11	70.97
9	Kabupaten Jember	68.99	69.28	69.68	0.57	0.59	0.59	9525	9294	9410	72.08	72.42	72.86
10	Kabupaten Banyuwangi	70.54	70.72	71.06	0.59	0.59	0.61	12264	12140	12217	79.92	79.71	80.90
11	Kabupaten Bondowoso	66.55	66.89	67.29	0.56	0.57	0.57	10665	10610	10690	73.52	73.96	74.29
12	Kabupaten Situbondo	68.97	69.24	69.62	0.57	0.58	0.59	10097	9857	9996	73.49	73.42	74.33
13	Kabupaten Probolinggo	67.00	67.36	67.78	0.54	0.55	0.55	10972	10859	10969	73.49	73.82	74.22
14	Kabupaten Pasuruan	70.17	70.25	70.55	0.58	0.59	0.60	10381	10164	10297	75.04	74.96	75.82
15	Kabupaten Sidoarjo	73.98	74.06	74.36	0.76	0.76	0.77	14609	14458	14578	93.65	93.36	94.15
16	Kabupaten Mojokerto	72.43	72.59	72.93	0.63	0.64	0.65	12860	12779	12844	83.72	84.05	84.76
17	Kabupaten Jombang	72.27	72.49	72.86	0.65	0.65	0.66	11533	11261	11394	81.52	80.96	81.83
18	Kabupaten Nganjuk	71.44	71.60	71.95	0.61	0.61	0.62	12200	12130	12172	81.01	80.92	81.58
19	Kabupaten Madiun	71.22	71.50	71.90	0.62	0.63	0.63	11650	11574	11658	80.13	80.48	80.83
20	Kabupaten Magetan	72.49	72.65	72.97	0.65	0.66	0.67	11779	11776	11833	82.18	82.65	83.32
21	Kabupaten Ngawi	72.16	72.41	72.81	0.59	0.59	0.60	11468	11418	11459	78.74	78.72	79.40
22	Kabupaten Bojonegoro	71.36	71.72	72.16	0.58	0.59	0.60	10265	10121	10221	75.18	75.38	76.20
23	Kabupaten Tuban	71.26	71.56	71.97	0.57	0.57	0.58	10499	10238	10380	75.27	74.75	75.67
24	Kabupaten Lamongan	72.27	72.49	72.86	0.64	0.64	0.65	11572	11456	11510	81.19	81.00	81.69
25	Kabupaten Gresik	72.61	72.67	72.99	0.69	0.69	0.70	13295	13246	13280	87.33	87.25	87.87
26	Kabupaten Bangkalan	70.11	70.22	70.54	0.51	0.52	0.52	8718	8610	8673	67.80	68.00	68.27
27	Kabupaten Sampang	67.96	68.07	68.38	0.49	0.51	0.51	8760	8739	8790	66.32	67.19	67.43

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Angka Harapan Hidup (%)			Indeks Pendidikan (%)			Indeks Standar Hidup (Ribu Rupiah)			Indeks Pembangunan Manusia (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
28	Kabupaten Pamekasan	67.45	67.67	68.03	0.59	0.60	0.60	8834	8739	8804	70.58	70.80	71.10
29	Kabupaten Sumenep	71.22	71.56	71.99	0.55	0.56	0.57	9082	8888	9000	70.86	70.88	71.75
30	Kota Kediri	73.96	74.04	74.34	0.75	0.75	0.76	12440	12239	12359	88.37	87.92	88.72
31	Kota Blitar	73.6	73.86	74.26	0.73	0.73	0.74	13851	13733	13816	90.62	90.47	91.23
32	Kota Malang	73.15	73.36	73.75	0.77	0.77	0.78	16666	16593	16663	97.91	97.86	98.60
33	Kota Probolinggo	70.19	70.35	70.68	0.67	0.67	0.68	12280	12180	12245	83.28	83.11	83.80
34	Kota Pasuruan	71.4	71.60	71.96	0.68	0.68	0.69	13393	13281	13354	86.64	86.47	87.20
35	Kota Mojokerto	73.21	73.39	73.74	0.73	0.73	0.74	13710	13499	13610	90.15	89.76	90.56
36	Kota Madiun	72.75	72.83	73.13	0.77	0.77	0.78	16040	16018	16095	96.50	96.49	97.19
37	Kota Surabaya	74.13	74.18	74.47	0.76	0.76	0.76	17854	17755	17862	100.20	100.03	100.36
38	Kota Batu	72.54	72.65	72.97	0.69	0.69	0.70	12870	12824	12887	86.36	86.31	86.99

Lampiran 2. Data Perhitungan Rasio Keuangan Daerah (X) Sejatim Periode 2019-2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun	PAD (satuan Milyar Rupiah)		Belanja Daerah (satuan Milyar Rupiah)		Rasio Efektivitas (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Pertumbuhan ekonomi (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
Kabupaten Pacitan	2019	166.32	199.04	1865.40	1921.21	119.67	965.24	7.50
Kabupaten Ponorogo	2019	247.54	290.82	2335.66	2419.62	117.48	832.00	0.62
Kabupaten Trenggalek	2019	280.17	285.13	2051.11	2025.84	101.77	710.50	21.95
Kabupaten Tulungagung	2019	439.53	486.36	2678.56	2609.24	110.65	536.48	7.33
Kabupaten Blitar	2019	237.31	285.74	2488.79	2462.29	120.41	861.72	13.19
Kabupaten Kediri	2019	391.00	457.76	3220.46	2991.17	117.07	653.44	-4.02
Kabupaten Malang	2019	525.97	623.81	4180.22	4089.40	118.60	655.55	6.58
Kabupaten Lumajang	2019	310.87	296.47	2367.63	2229.23	95.37	751.92	9.73

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun	PAD (satuan Milyar Rupiah)		Belanja Daerah (satuan Milyar Rupiah)		Rasio Efektivitas (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Pertumbuhan ekonomi (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
Kabupaten Jember	2019	630.62	667.60	4023.38	3876.91	105.86	580.72	11.73
Kabupaten Banyuwangi	2019	571.70	495.69	3190.40	3021.32	86.70	609.52	10.14
Kabupaten Bondowoso	2019	193.33	218.54	2058.94	2205.81	113.04	1009.34	7.53
Kabupaten Situbondo	2019	189.33	204.73	1749.68	1821.89	108.13	889.90	9.31
Kabupaten Probolinggo	2019	233.48	245.43	2425.01	2412.87	105.12	983.12	4.67
Kabupaten Pasuruan	2019	643.35	650.89	3584.18	3244.33	101.17	498.45	5.96
Kabupaten Sidoarjo	2019	1603.00	1689.95	4826.49	4344.72	105.42	257.09	0.26
Kabupaten Mojokerto	2019	501.07	555.00	2570.16	2559.61	110.76	461.19	1.59
Kabupaten Jombang	2019	439.13	476.66	2799.41	2653.74	108.55	556.74	8.78
Kabupaten Nganjuk	2019	342.77	368.27	2406.85	2542.00	107.44	690.25	1.85
Kabupaten Madiun	2019	200.52	229.21	1961.81	1948.31	114.31	850.01	4.64
Kabupaten Magetan	2019	192.75	237.38	1809.41	1984.64	123.15	836.06	20.60
Kabupaten Ngawi	2019	211.01	255.08	2183.63	2212.05	120.89	867.20	13.94
Kabupaten Bojonegoro	2019	482.55	561.25	4793.14	4585.07	116.31	816.94	32.01
Kabupaten Tuban	2019	396.86	518.00	2480.94	2554.65	130.52	493.18	17.05
Kabupaten Lamongan	2019	503.99	472.00	2951.79	2875.51	93.65	609.22	8.11
Kabupaten Gresik	2019	909.91	980.78	3128.64	2980.71	107.79	303.91	2.46
Kabupaten Bangkalan	2019	215.94	262.26	2360.42	2336.78	121.45	891.02	31.62
Kabupaten Sampang	2019	149.92	168.78	1870.80	1802.32	112.58	1067.85	24.70
Kabupaten Pamekasan	2019	173.69	219.67	2096.44	1949.15	126.47	887.31	-1.23
Kabupaten Sumenep	2019	254.49	246.42	2593.95	2323.12	96.83	942.75	32.61
Kota Kediri	2019	224.56	266.75	1291.79	1312.91	118.79	492.19	7.09
Kota Blitar	2019	173.65	166.14	988.75	974.73	95.68	586.69	1.91

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun	PAD (satuan Milyar Rupiah)		Belanja Daerah (satuan Milyar Rupiah)		Rasio Efektivitas (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Pertumbuhan ekonomi (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
Kota Malang	2019	533.51	588.07	2206.28	1909.78	110.23	324.75	5.60
Kota Probolinggo	2019	175.93	175.78	1162.99	1058.97	99.91	602.44	-0.01
Kota Pasuruan	2019	139.03	161.71	1026.16	862.29	116.31	533.23	5.67
Kota Mojokerto	2019	205.92	192.70	999.54	852.08	93.58	442.18	5.58
Kota Madiun	2019	206.49	252.05	1221.76	1148.50	122.06	455.66	9.18
Kota Surabaya	2019	5190.30	5381.92	9506.27	9162.66	103.69	170.25	8.23
Kota Batu	2019	153.33	183.72	1000.47	946.96	119.82	515.44	13.01
Kabupaten Pacitan	2020	194.71	168.46	1716.28	1570.27	86.52	932.13	-15.36
Kabupaten Ponorogo	2020	295.14	303.33	2439.28	2228.54	102.77	734.69	4.30
Kabupaten Trenggalek	2020	302.58	257.98	2075.03	1861.99	85.26	721.76	-9.52
Kabupaten Tulungagung	2020	446.58	510.55	2763.35	2643.65	114.32	517.80	4.97
Kabupaten Blitar	2020	263.66	302.54	2571.91	2282.94	114.75	754.59	5.88
Kabupaten Kediri	2020	424.92	494.41	3415.51	2832.28	116.35	572.86	8.01
Kabupaten Malang	2020	715.98	583.85	4402.48	3904.35	81.55	668.72	-6.41
Kabupaten Lumajang	2020	320.54	300.26	2414.94	2028.73	93.67	675.66	1.28
Kabupaten Jember	2020	750.02	593.18	4532.28	3297.61	79.09	555.92	-11.15
Kabupaten Banyuwangi	2020	595.21	482.74	3375.48	3140.64	81.10	650.59	-2.61
Kabupaten Bondowoso	2020	232.93	222.66	2197.29	1957.38	95.59	879.09	1.89
Kabupaten Situbondo	2020	197.10	218.85	1841.94	1696.58	111.04	775.23	6.90
Kabupaten Probolinggo	2020	244.68	254.88	2484.14	2302.24	104.17	903.26	3.85
Kabupaten Pasuruan	2020	731.16	700.15	3840.41	3238.38	95.76	462.53	7.57
Kabupaten Sidoarjo	2020	1810.10	1798.52	5365.59	4430.66	99.36	246.35	6.42
Kabupaten Mojokerto	2020	542.34	537.30	2602.91	2404.90	99.07	447.59	-3.19

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun	PAD (satuan Milyar Rupiah)		Belanja Daerah (satuan Milyar Rupiah)		Rasio Efektivitas (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Pertumbuhan ekonomi (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
Kabupaten Jombang	2020	467.36	468.63	2854.66	2527.28	100.27	539.29	-1.68
Kabupaten Nganjuk	2020	367.11	402.35	2568.65	2383.28	109.60	592.34	9.25
Kabupaten Madiun	2020	219.45	258.21	1981.48	1796.56	117.66	695.77	12.65
Kabupaten Magetan	2020	222.60	203.47	1899.68	1790.37	91.41	879.92	-14.29
Kabupaten Ngawi	2020	238.29	269.98	2328.78	2146.48	113.30	795.05	5.84
Kabupaten Bojonegoro	2020	843.28	720.91	6404.50	4358.62	85.49	604.60	28.45
Kabupaten Tuban	2020	564.66	566.08	2697.30	2463.77	100.25	435.23	9.28
Kabupaten Lamongan	2020	554.42	481.75	3098.20	2823.14	86.89	586.02	2.07
Kabupaten Gresik	2020	1163.67	924.66	3568.29	3095.54	79.46	334.78	-5.72
Kabupaten Bangkalan	2020	261.80	233.18	2362.33	2116.22	89.07	907.55	-11.09
Kabupaten Sampang	2020	198.96	175.52	1954.23	1730.65	88.22	986.01	3.99
Kabupaten Pamekasan	2020	184.41	232.26	2353.21	2059.12	125.95	886.56	5.73
Kabupaten Sumenep	2020	266.80	260.33	2722.74	2544.77	97.57	977.52	5.64
Kota Kediri	2020	251.28	262.89	1424.63	1207.69	104.62	459.39	-1.45
Kota Blitar	2020	174.02	174.59	1025.23	868.06	100.33	497.20	5.09
Kota Malang	2020	731.10	491.19	2733.00	2103.47	67.19	428.24	-16.47
Kota Probolinggo	2020	200.98	183.68	1177.82	877.67	91.39	477.83	4.49
Kota Pasuruan	2020	142.87	145.04	1089.86	824.82	101.52	568.68	-10.31
Kota Mojokerto	2020	205.94	231.88	1014.50	804.41	112.60	346.91	20.33
Kota Madiun	2020	235.50	248.94	1278.16	1014.63	105.71	407.58	-1.23
Kota Surabaya	2020	5584.63	4289.96	10322.23	8032.68	76.82	187.24	-20.29
Kota Batu	2020	194.71	168.46	1716.28	1570.27	86.52	932.13	-8.31
Kabupaten Pacitan	2021	200.69	211.69	1670.01	1610.28	105.48	760.68	25.66

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun	PAD (satuan Milyar Rupiah)		Belanja Daerah (satuan Milyar Rupiah)		Rasio Efektivitas (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Pertumbuhan ekonomi (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
Kabupaten Ponorogo	2021	271.64	376.70	2379.64	2112.62	138.68	560.82	24.19
Kabupaten Trenggalek	2021	268.64	233.49	1951.64	1840.13	86.92	788.10	-9.49
Kabupaten Tulungagung	2021	436.04	953.89	2506.26	2753.99	218.76	288.71	86.84
Kabupaten Blitar	2021	284.05	407.53	2314.92	2294.17	143.47	562.95	34.70
Kabupaten Kediri	2021	425.69	513.77	3168.89	2937.42	120.69	571.74	3.92
Kabupaten Malang	2021	715.98	669.36	4295.12	3873.44	93.49	578.68	14.65
Kabupaten Lumajang	2021	307.95	325.05	2232.11	2150.42	105.55	661.57	8.26
Kabupaten Jember	2021	716.85	635.31	4448.91	3731.63	88.63	587.37	7.10
Kabupaten Banyuwangi	2021	592.74	520.02	3216.20	3093.59	87.73	594.90	7.72
Kabupaten Bondowoso	2021	233.31	223.14	2079.28	1963.80	95.64	880.08	0.22
Kabupaten Situbondo	2021	212.06	228.77	1843.16	1652.27	107.88	722.24	4.53
Kabupaten Probolinggo	2021	241.65	300.40	2513.85	2234.95	124.31	743.99	17.86
Kabupaten Pasuruan	2021	724.01	701.20	3453.88	3273.76	96.85	466.88	0.15
Kabupaten Sidoarjo	2021	1609.82	1921.24	5329.32	4936.10	119.35	256.92	6.82
Kabupaten Mojokerto	2021	540.12	625.42	2558.30	2443.31	115.79	390.67	16.40
Kabupaten Jombang	2021	477.85	665.84	2766.85	2785.98	139.34	418.42	42.08
Kabupaten Nganjuk	2021	359.76	478.46	2335.57	2395.34	132.99	500.64	18.92
Kabupaten Madiun	2021	220.77	333.15	1839.39	1866.34	150.90	560.21	29.02
Kabupaten Magetan	2021	218.92	243.73	1898.61	1773.06	111.33	727.47	19.79
Kabupaten Ngawi	2021	242.03	283.61	2270.42	2205.16	117.18	777.53	5.05
Kabupaten Bojonegoro	2021	691.31	955.64	6219.91	5086.92	138.24	532.31	32.56
Kabupaten Tuban	2021	480.01	614.73	2457.05	2464.98	128.07	400.99	8.59
Kabupaten Lamongan	2021	467.69	604.59	2938.94	2871.01	129.27	474.87	25.50

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun	PAD (satuan Milyar Rupiah)		Belanja Daerah (satuan Milyar Rupiah)		Rasio Efektivitas (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Pertumbuhan ekonomi (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
Kabupaten Gresik	2021	1132.30	1031.39	3433.49	3192.75	91.09	309.56	11.54
Kabupaten Bangkalan	2021	262.47	271.66	2287.33	2211.22	103.50	813.97	16.50
Kabupaten Sampang	2021	228.94	135.50	2111.26	1836.34	59.19	1355.23	-22.80
Kabupaten Pamekasan	2021	194.57	205.97	2182.10	1978.70	105.86	960.67	-11.32
Kabupaten Sumenep	2021	231.59	252.69	2474.46	2390.69	109.11	946.10	-2.93
Kota Kediri	2021	272.35	439.90	1428.49	1344.27	161.52	305.59	67.33
Kota Blitar	2021	187.33	297.62	960.46	986.00	158.87	331.29	70.47
Kota Malang	2021	776.69	603.79	2554.77	2225.95	77.74	368.66	22.92
Kota Probolinggo	2021	216.83	212.85	1089.91	898.56	98.16	422.16	15.88
Kota Pasuruan	2021	133.36	131.84	1097.53	858.58	98.86	651.23	-9.10
Kota Mojokerto	2021	202.83	256.38	1042.61	953.45	126.40	371.89	10.57
Kota Madiun	2021	226.89	265.92	1140.82	1073.68	117.20	403.76	6.82
Kota Surabaya	2021	5561.56	4727.28	9828.39	7819.08	85.00	165.40	10.19
Kota Batu	2021	200.00	147.01	1087.36	989.97	73.51	673.40	-12.73

Lampiran 3. Data Tabulasi Periode 2019

Kab/Kota Se-jatim	Y	X1	X2	X3
Kabupaten Pacitan	72.59	119.67	965.24	7.50
Kabupaten Ponorogo	76.36	117.48	832.00	0.62
Kabupaten Trenggalek	74.95	101.77	710.50	21.95
Kabupaten Tulungagung	79.76	110.65	536.48	7.33
Kabupaten Blitar	77.77	120.41	861.72	13.19
Kabupaten Kediri	79.44	117.07	653.44	-4.02
Kabupaten Malang	76.85	118.60	655.55	6.58
Kabupaten Lumajang	70.49	95.37	751.92	9.73
Kabupaten Jember	72.08	105.86	580.72	11.73
Kabupaten Banyuwangi	79.92	86.70	609.52	10.14
Kabupaten Bondowoso	73.52	113.04	1009.34	7.53
Kabupaten Situbondo	73.49	108.13	889.90	9.31
Kabupaten Probolinggo	73.49	105.12	983.12	4.67
Kabupaten Pasuruan	75.04	101.17	498.45	5.96
Kabupaten Sidoarjo	93.65	105.42	257.09	0.26
Kabupaten Mojokerto	83.72	110.76	461.19	1.59
Kabupaten Jombang	81.52	108.55	556.74	8.78
Kabupaten Nganjuk	81.01	107.44	690.25	1.85
Kabupaten Madiun	80.13	114.31	850.01	4.64
Kabupaten Magetan	82.18	123.15	836.06	20.60
Kabupaten Ngawi	78.74	120.89	867.20	13.94
Kabupaten Bojonegoro	75.18	116.31	816.94	32.01
Kabupaten Tuban	75.27	130.52	493.18	17.05
Kabupaten Lamongan	81.19	93.65	609.22	8.11
Kabupaten Gresik	87.33	107.79	303.91	2.46
Kabupaten Bangkalan	67.80	121.45	891.02	31.62
Kabupaten Sampang	66.32	112.58	1067.85	24.70
Kabupaten Pamekasan	70.58	126.47	887.31	-1.23
Kabupaten Sumenep	70.86	96.83	942.75	32.61
Kota Kediri	88.37	118.79	492.19	7.09
Kota Blitar	90.62	95.68	586.69	1.91
Kota Malang	97.91	110.23	324.75	5.60
Kota Probolinggo	83.28	99.91	602.44	-0.01
Kota Pasuruan	86.64	116.31	533.23	5.67
Kota Mojokerto	90.15	93.58	442.18	5.58
Kota Madiun	96.50	122.06	455.66	9.18
Kota Surabaya	100.20	103.69	170.25	8.23
Kota Batu	86.36	119.82	515.44	13.01

DATA TABULASI PERIODE 2020

Kab./Kota Sejatim	Y	X1	X2	X3
Kabupaten Pacitan	72.45	86.52	932.13	-15.36
Kabupaten Ponorogo	76.28	102.77	734.69	4.30
Kabupaten Trenggalek	74.87	85.26	721.76	-9.52
Kabupaten Tulungagung	80.21	114.32	517.80	4.97
Kabupaten Blitar	77.35	114.75	754.59	5.88
Kabupaten Kediri	79.55	116.35	572.86	8.01
Kabupaten Malang	76.30	81.55	668.72	-6.41
Kabupaten Lumajang	70.11	93.67	675.66	1.28
Kabupaten Jember	72.42	79.09	555.92	-11.15
Kabupaten Banyuwangi	79.71	81.10	650.59	-2.61
Kabupaten Bondowoso	73.96	95.59	879.09	1.89
Kabupaten Situbondo	73.42	111.04	775.23	6.90
Kabupaten Probolinggo	73.82	104.17	903.26	3.85
Kabupaten Pasuruan	74.96	95.76	462.53	7.57
Kabupaten Sidoarjo	93.36	99.36	246.35	6.42
Kabupaten Mojokerto	84.05	99.07	447.59	-3.19
Kabupaten Jombang	80.96	100.27	539.29	-1.68
Kabupaten Nganjuk	80.92	109.60	592.34	9.25
Kabupaten Madiun	80.48	117.66	695.77	12.65
Kabupaten Magetan	82.65	91.41	879.92	-14.29
Kabupaten Ngawi	78.72	113.30	795.05	5.84
Kabupaten Bojonegoro	75.38	85.49	604.60	28.45
Kabupaten Tuban	74.75	100.25	435.23	9.28
Kabupaten Lamongan	81.00	86.89	586.02	2.07
Kabupaten Gresik	87.25	79.46	334.78	-5.72
Kabupaten Bangkalan	68.00	89.07	907.55	-11.09
Kabupaten Sampang	67.19	88.22	986.01	3.99
Kabupaten Pamekasan	70.80	125.95	886.56	5.73
Kabupaten Sumenep	70.88	97.57	977.52	5.64
Kota Kediri	87.92	104.62	459.39	-1.45
Kota Blitar	90.47	100.33	497.20	5.09
Kota Malang	97.86	67.19	428.24	-16.47
Kota Probolinggo	83.11	91.39	477.83	4.49
Kota Pasuruan	86.47	101.52	568.68	-10.31
Kota Mojokerto	89.76	112.60	346.91	20.33
Kota Madiun	96.49	105.71	407.58	-1.23
Kota Surabaya	100.03	76.82	187.24	-20.29
Kota Batu	86.31	86.52	932.13	-8.31

Lampiran 4. Data Penelitian Keuangan Jatim Periode 2021

Kab/Kota Se-Jatim	Y	X1	X2	X3
Kabupaten Pacitan	73.24	105.48	760.68	25.66
Kabupaten Ponorogo	76.87	138.68	560.82	24.19
Kabupaten Trenggalek	75.72	86.92	788.10	-9.49
Kabupaten Tulungagung	80.60	218.76	288.71	86.84
Kabupaten Blitar	78.16	143.47	562.95	34.70
Kabupaten Kediri	80.40	120.69	571.74	3.92
Kabupaten Malang	77.18	93.49	578.68	14.65
Kabupaten Lumajang	70.97	105.55	661.57	8.26
Kabupaten Jember	72.86	88.63	587.37	7.10
Kabupaten Banyuwangi	80.90	87.73	594.90	7.72
Kabupaten Bondowoso	74.29	95.64	880.08	0.22
Kabupaten Situbondo	74.33	107.88	722.24	4.53
Kabupaten Probolinggo	74.22	124.31	743.99	17.86
Kabupaten Pasuruan	75.82	96.85	466.88	0.15
Kabupaten Sidoarjo	94.15	119.35	256.92	6.82
Kabupaten Mojokerto	84.76	115.79	390.67	16.40
Kabupaten Jombang	81.83	139.34	418.42	42.08
Kabupaten Nganjuk	81.58	132.99	500.64	18.92
Kabupaten Madiun	80.83	150.90	560.21	29.02
Kabupaten Magetan	83.32	111.33	727.47	19.79
Kabupaten Ngawi	79.40	117.18	777.53	5.05
Kabupaten Bojonegoro	76.20	138.24	532.31	32.56
Kabupaten Tuban	75.67	128.07	400.99	8.59
Kabupaten Lamongan	81.69	129.27	474.87	25.50
Kabupaten Gresik	87.87	91.09	309.56	11.54
Kabupaten Bangkalan	68.27	103.50	813.97	16.50
Kabupaten Sampang	67.43	59.19	1355.23	-22.80
Kabupaten Pamekasan	71.10	105.86	960.67	-11.32
Kabupaten Sumenep	71.75	109.11	946.10	-2.93
Kota Kediri	88.72	161.52	305.59	67.33
Kota Blitar	91.23	158.87	331.29	70.47
Kota Malang	98.60	77.74	368.66	22.92
Kota Probolinggo	83.80	98.16	422.16	15.88
Kota Pasuruan	87.20	98.86	651.23	-9.10
Kota Mojokerto	90.56	126.40	371.89	10.57
Kota Madiun	97.19	117.20	403.76	6.82
Kota Surabaya	100.36	85.00	165.40	10.19
Kota Batu	86.99	73.51	673.40	-12.73

Lampiran 5. Hasil Regresi Data Panel Model Estimasi CEM

Dependent Variable: LN_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/23/22 Time: 02:17
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.606668	0.047093	97.82135	0.0000
X1	8.95E-05	0.000435	0.205768	0.8374
X2	-0.000359	2.72E-05	-13.18406	0.0000
X3	-0.001126	0.000566	-1.988569	0.0492
Root MSE	0.062297	R-squared	0.612523	
Mean dependent var	4.383094	Adjusted R-squared	0.601956	
S.D. dependent var	0.100521	S.E. of regression	0.063420	
Akaike info criterion	-2.643627	Sum squared resid	0.442427	
Schwarz criterion	-2.547620	Log likelihood	154.6867	
Hannan-Quinn criter.	-2.604663	F-statistic	57.96264	
Durbin-Watson stat	0.308719	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 6. Hasil Regresi Data Panel Model Estimasi FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.391672	0.009220	476.2946	0.0000
X1	2.25E-05	6.16E-05	0.365495	0.7158
X2	-1.79E-05	9.22E-06	-1.936526	0.0567
X3	1.17E-05	7.30E-05	0.160247	0.8731
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.004626	R-squared	0.997864	
Mean dependent var	4.383094	Adjusted R-squared	0.996693	
S.D. dependent var	0.100521	S.E. of regression	0.005780	
Akaike info criterion	-7.195160	Sum squared resid	0.002439	
Schwarz criterion	-6.211089	Log likelihood	451.1241	
Hannan-Quinn criter.	-6.795781	F-statistic	852.5205	
Durbin-Watson stat	2.907274	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 7. Hasil Regresi Data Panel Model Estimasi REM

Dependent Variable: LN_Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/23/22 Time: 02:25
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 114
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.401600	0.013519	325.5965	0.0000
X1	9.90E-06	6.15E-05	0.161171	0.8723
X2	-3.12E-05	9.05E-06	-3.442286	0.0008
X3	-2.11E-05	7.28E-05	-0.290522	0.7720

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.061555	0.9913
Idiosyncratic random		0.005780	0.0087

Weighted Statistics			
Root MSE	0.006950	R-squared	0.096350
Mean dependent var	0.237286	Adjusted R-squared	0.071705
S.D. dependent var	0.007344	S.E. of regression	0.007076
Sum squared resid	0.005507	F-statistic	3.909494
Durbin-Watson stat	1.398581	Prob(F-statistic)	0.010720

Unweighted Statistics			
R-squared	0.101829	Mean dependent var	4.383094
Sum squared resid	1.025545	Durbin-Watson stat	0.007510

Lampiran 8. Hasil Uji Chow Perbandingan CEM dengan FEM

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	355.907173	(37,73)	0.0000
Cross-section Chi-square	592.874854	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: LN_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/23/22 Time: 02:22
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.606668	0.047093	97.82135	0.0000
X1	8.95E-05	0.000435	0.205768	0.8374
X2	-0.000359	2.72E-05	-13.18406	0.0000
X3	-0.001126	0.000566	-1.988569	0.0492
Root MSE	0.062297	R-squared		0.612523
Mean dependent var	4.383094	Adjusted R-squared		0.601956
S.D. dependent var	0.100521	S.E. of regression		0.063420
Akaike info criterion	-2.643627	Sum squared resid		0.442427
Schwarz criterion	-2.547620	Log likelihood		154.6867
Hannan-Quinn criter.	-2.604663	F-statistic		57.96264
Durbin-Watson stat	0.308719	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 9. Hasil Uji Hausman Perbandingan FEM dengan REM

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57.818225	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000023	0.000010	0.000000	0.0038
X2	-0.000018	-0.000031	0.000000	0.0000
X3	0.000012	-0.000021	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LN_Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/23/22 Time: 02:28

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.391672	0.009220	476.2946	0.0000
X1	2.25E-05	6.16E-05	0.365495	0.7158
X2	-1.79E-05	9.22E-06	-1.936526	0.0567
X3	1.17E-05	7.30E-05	0.160247	0.8731

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.004626	R-squared		0.997864
Mean dependent var	4.383094	Adjusted R-squared		0.996693

S.D. dependent var	0.100521	S.E. of regression	0.005780
Akaike info criterion	-7.195160	Sum squared resid	0.002439
Schwarz criterion	-6.211089	Log likelihood	451.1241
Hannan-Quinn criter.	-6.795781	F-statistic	852.5205
Durbin-Watson stat	2.907274	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 10. Hasil Uji LM (Largrenge Multiplier)

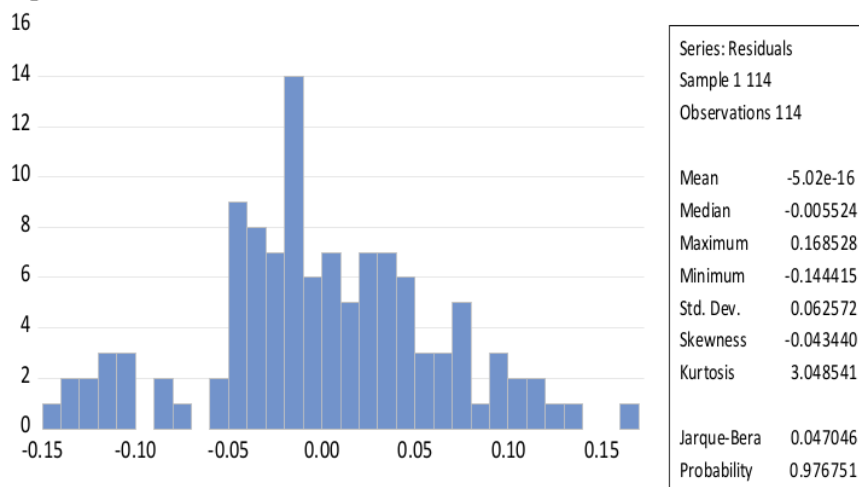
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	78.85000 (0.0000)	0.041266 (0.8390)	78.89126 (0.0000)
Honda	8.879752 (0.0000)	-0.203139 (0.5805)	6.135292 (0.0000)
King-Wu	8.879752 (0.0000)	-0.203139 (0.5805)	1.813006 (0.0349)
Standardized Honda	9.206927 (0.0000)	0.333219 (0.3695)	2.306235 (0.0105)
Standardized King-Wu	9.206927 (0.0000)	0.333219 (0.3695)	-0.142884 (0.5568)
Gourieroux, et al.	--	--	78.85000 (0.0000)

Lampiran 11. Uji Noemalitas



Lampiran 12. Hasil Uji prasyarat Multikolinieritas**Correlation**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.164484	0.750546
X2	-0.164484	1.000000	-0.218075
X3	0.750546	-0.218075	1.000000

Lampiran 13. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	59.17435	Prob. F(2,108)	0.0000
Obs*R-squared	59.60605	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/23/22 Time: 00:54

Sample: 1 114

Included observations: 114

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.239699	2.727299	0.087889	0.9301
X1	-0.014644	0.025231	-0.580392	0.5629
X2	0.001892	0.001588	1.191986	0.2359
X3	0.024282	0.032993	0.735993	0.4633
RESID(-1)	0.635688	0.096456	6.590458	0.0000
RESID(-2)	0.133073	0.100292	1.326858	0.1874
R-squared	0.522860	Mean dependent var	-1.37E-14	
Adjusted R-squared	0.500770	S.D. dependent var	5.195851	
S.E. of regression	3.671191	Akaike info criterion	5.490105	
Sum squared resid	1455.585	Schwarz criterion	5.634115	
Log likelihood	-306.9360	Hannan-Quinn criter.	5.548551	
F-statistic	23.66974	Durbin-Watson stat	1.895237	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 14. Hasil Uji Heteroskedastitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.756848	Prob. F(3,110)	0.1597
Obs*R-squared	5.212450	Prob. Chi-Square(3)	0.1569
Scaled explained SS	4.970867	Prob. Chi-Square(3)	0.1739

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/23/22 Time: 01:49

Sample: 1 114

Included observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.012098	0.004102	2.949418	0.0039
X1	-5.72E-05	3.79E-05	-1.510805	0.1337
X2	-3.53E-06	2.37E-06	-1.489327	0.1393
X3	1.62E-05	4.93E-05	0.328542	0.7431
R-squared	0.045723	Mean dependent var		0.003881
Adjusted R-squared	0.019698	S.D. dependent var		0.005579
S.E. of regression	0.005524	Akaike info criterion		-7.524980
Sum squared resid	0.003357	Schwarz criterion		-7.428973
Log likelihood	432.9238	Hannan-Quinn criter.		-7.486016
F-statistic	1.756848	Durbin-Watson stat		1.183616
Prob(F-statistic)	0.159669			

Lampiran 15. Hasil Analisis Regresi Data Panel dari Model FEM

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/21/22 Time: 01:06
Sample: 2019 2021
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.14788	0.727773	111.5016	0.0000
X1	0.001310	0.004863	0.269369	0.7884
X2	-0.001316	0.000728	-1.808349	0.0747
X3	0.002561	0.005759	0.444660	0.6579

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.365092	R-squared	0.998035
Mean dependent var	80.49316	Adjusted R-squared	0.996958
S.D. dependent var	8.272393	S.E. of regression	0.456240
Akaike info criterion	1.541962	Sum squared resid	15.19528
Schwarz criterion	2.526033	Log likelihood	-46.89183
Hannan-Quinn criter.	1.941341	F-statistic	926.9165
Durbin-Watson stat	2.934707	Prob(F-statistic)	0.000000

ORIGINALITY REPORT

45%
SIMILARITY INDEX

41%
INTERNET SOURCES

30%
PUBLICATIONS

21%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	11%
2	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	6%
3	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id Internet Source	1%
6	text-id.123dok.com Internet Source	1%
7	journal.ikopin.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	Eka Marisca Harliyani, Haryadi Haryadi. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan	1%

Manusia di Provinsi Jambi", Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2016

Publication

10	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
15	Submitted to The University of Buckingham Student Paper	1 %
16	Yulens Frits Bonai, Syaikhul Falah, Sylvia C. Daat. "PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAROPEN", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2019 Publication	1 %
17	adeputrihandayanibinadarma.blogspot.com Internet Source	1 %

18 Noni Kumpangpune, David P.E. Saerang, Daisy S.M. Engka. "PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA BITUNG", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019
Publication <1 %

19 Submitted to Academic Library Consortium
Student Paper <1 %

20 Submitted to Universitas Nasional
Student Paper <1 %

21 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source <1 %

22 repository.unej.ac.id
Internet Source <1 %

23 repository.uinsu.ac.id
Internet Source <1 %

24 123dok.com
Internet Source <1 %

25 repository.unipasby.ac.id
Internet Source <1 %

26 lib.unnes.ac.id
Internet Source <1 %

27 repository.umj.ac.id

<1 %

28

docobook.com

Internet Source

<1 %

29

Eko Prasetyo, Muhammad Reza Soekamto Putra. "PENGARUH CASH FLOW, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)", JCA (JURNAL CENDEKIA AKUNTANSI), 2022

Publication

<1 %

30

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

31

Submitted to Universitas Sanata Dharma

Student Paper

<1 %

32

Riesta Chahya Agustina, Awan Santosa. "PENGARUH DAR, DER DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN FARMASI", Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2019

Publication

<1 %

33

eprints.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

34

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

35	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.upi-yai.ac.id Internet Source	<1 %
37	adoc.pub Internet Source	<1 %
38	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
40	Alfauzi Agus, Baharuddin Semmaila, Zainuddin Rahman, Mappaujung Maknun. "Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021 Publication	<1 %
41	anzdoc.com Internet Source	<1 %
42	MAKSI MAKSI MAKSI. "Volume 2 Nomor 1 Juni 2011", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2011 Publication	<1 %
43	epub.imandiri.id Internet Source	<1 %

44

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Student Paper

<1 %

45

Fadly Yashari Soumena, Nurul Qayyum.
"DETERMINAN VARIABEL WORD OF MOUTH
(WOM) DAN ISLAMIC BRAND IMAGE
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
PROPERTI SYARIAH (THE MATA RESIDENCE
KABUPATEN GOWA)", OIKONOMIKA : Jurnal
Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022

Publication

<1 %

46

MARJANI AMILIAH. "PENGARUH RETURN ON
EQUITY, DEBT TO EQUITY RATIO, CURRENT
RATIO, DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA EMITEN
PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2011-2013", MANAJERIAL, 2018

Publication

<1 %

47

Edy Riyanto. "FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENENTUAN NILAI SEWA
PROPERTI UNTUK PENEMPATAN MESIN
ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)", Jurnal
Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2020

Publication

<1 %

48

Jehuda Jean Sanny Mongan. "Pengaruh
pengeluaran pemerintah bidang pendidikan
dan kesehatan terhadap indeks
pembangunan manusia di Indonesia",

<1 %

Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2019

Publication

49

Novira Sartika, Adrian Irnanda Pratama.
"Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak
Tahun Anggaran 2012 - 2016", Moneter -
Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2019

Publication

50

Submitted to POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN

Student Paper

51

Ukat Firmansyah, Junaidi Junaidi, Erni
Achmad. "Pengaruh nilai tukar petani, indeks
pembangunan manusia dan PDRB sektor
pertanian terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan Provinsi di Wilayah Sumatera", e-
Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan
Daerah, 2022

Publication

52

Lynda L, Meinarni Asnawi, Bill J. C. Pangayow.
"PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
(SIMDA), KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

LAPORAN KEUANGAN DAERAH", Jurnal
Akuntansi, Audit, dan Aset, 2019

Publication

53

Lintang Sania, Mohammad Balafif, Nurul
Imamah. "Pengaruh PDRB, Tingkat
Pengangguran Terbuka dan UMR Terhadap
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten
dan Kota Provinsi Jawa Timur", Bharanomics,
2021

Publication

<1 %

54

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

55

Goodwill Jurnal. "Goodwill Vol. 6 No. 1 Juni
2015", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN
AUDITING "GOODWILL", 2015

Publication

<1 %

56

Julius Tamawiwiy, Jullie J Sondakh, Jessy D.L
Warongan. "PENGARUH KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA
MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK (Studi
pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi
Utara)", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN
AUDITING "GOODWILL", 2016

Publication

<1 %

57

digilib.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

58

Andi Maujung Tjodi, Tri Oldy Rotinsulu, George M.V. Kawung. "PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI DI PROVINSI SULAWESI UTARA)", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019

Publication

<1 %

59

Fenty Fauziah, Sri Wahyuni Jamal. "ANALISIS PENGARUH LEVERAGE, FINANCIAL PERFORMANCE FIRM SIZE DAN SALES GROWTH TERHADAP FIRM VALUE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA", Research Journal of Accounting and Business Management, 2020

Publication

<1 %

60

ojs3.unpatti.ac.id

Internet Source

<1 %

61

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

62

Melisa Virginia Inkiriwang, Imelda Wellin Juliana Ogi, Djemly Woran. "PENGARUH DIGITAL MARKETING, KUALITAS PRODUK DAN EMOSIONAL TERHADAP KEPUASAN

<1 %

KONSUMEN PINKY KITTY SHOP TONDANO",
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi,
Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2022

Publication

63

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

64

Arina Azwani. "Cadangan Emas, Harga Emas dan Stabilitas Mata Uang di Negara Islam",
JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI, 2021

Publication

<1 %

65

Abdullah Abdullah, Sri Mardatillah. "KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA", JURNAL FAIRNESS, 2021

Publication

<1 %

66

Meta Nursita. "PENGARUH LABA AKUNTANSI, ARUS KAS OPERASI, ARUS KAS INVESTASI, ARUS KAS PENDANAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM",
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2021

Publication

<1 %

67

Avrizal Avrizar, Haryadi Haryadi, Syurya Hidayat. "Analisis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada pondok pesentren di Kota Jambi", Jurnal Paradigma Ekonomika, 2021

Publication

<1 %

68

Muhammad Adnan Azzaki. "PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL, DAN KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA-NEGARA ASEAN", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2021

Publication

<1 %

69

Muhammad Yusuf, Andika Kurniawan. "Pengaruh Non-Debt Tax Shield Dan Cost Of Financial Distress Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017", Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan, 2020

Publication

<1 %

70

Novi Darmayanti. "ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN MODEL ZMIJEWSKI DAN SPRINGATE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN BATUBARA YANG TERCATAT DI BEI TAHUN 2016-2018)", Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 2020

Publication

<1 %

71

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

72

Hanifah Aqliyah, Evinovita Evinovita. "Faktor Penyebab Rendahnya Minat UMKM di

<1 %

Kecamatan Pamijahan Dalam Memilih
Pembiayaan pada Bank Syariah", El-Mal:
Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2018

Publication

73

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

74

Abdul Azis, Dahlan Tampubolon, Selly Prima
Desweni. "Analisis Pengaruh Desentralisasi
Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Daerah Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau
Tahun 2012-2020", Ekopem: Jurnal Ekonomi
Pembangunan, 2022

Publication

<1 %

75

Suyadi Suyadi, Lukman Nuzul Hakim,
Febriyanto Febriyanto. "ANALISIS PENGARUH
INFLASI DAN KURS TERHADAP FLUKTUASI
NILAI SAHAM (STUDI KASUS PADA
PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2019-2021)", Jurnal Riset Akuntansi
dan Manajemen Malahayati, 2023

Publication

<1 %

76

Herinoto Herinoto, M. Rachmad R, Zulfanetti
Zulfanetti. "Faktor penentu indeks
pembangunan manusia dan hubungannya
dengan belanja infrastruktur serta
pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota

<1 %

Provinsi Jambi", Jurnal Paradigma Ekonomika, 2021

Publication

77

MAKSI MAKSI MAKSI. "Volume 2 Nomor 2
Desember 2011", JURNAL RISET AKUNTANSI
DAN AUDITING "GOODWILL", 2011

Publication

<1 %

78

Marselina H. Umbung, Wehelmina M. Ndoen,
Paulina Yuritha Amtiran. "PENGARUH
KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PROFITABILITAS
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN", JURNAL
AKUNTANSI, 2021

Publication

<1 %

79

Submitted to Universitas Persada Indonesia
Y.A.I

Student Paper

<1 %

80

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

81

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

82

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

83

Ayu Maulidina, M. Kholil Nawawi, Abrista Devi.
"Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah
terhadap Kemiskinan di Indonesia", El-Mal:
Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022

Publication

<1 %

84

Eko Indra Praza. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi", Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2016

Publication

<1 %

85

Pieter Leunupun, Grace Persulesy, Melisa Yuliana Souhuwat. "Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", Owner, 2022

Publication

<1 %

86

Ria Apriliani, Evi Martaseli, Ade Sudarma. "PENGARUH PIUTANG USAHA DAN UTANG USAHA TERHADAP ARUS KAS OPERASI MASA DEPAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2021", Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati, 2022

Publication

<1 %

87

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

88

Amalia Tiara Balqish. "Pengaruh CR dan DER terhadap ROE pada Perusahaan Perdagangan Eceran di BEI Periode 2015-2018", Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi), 2020

Publication

<1 %

89

Emilia Fornia, Mukhzarudfa Mukhzarudfa, Muhammad Gowon. "ANALISIS KINERJA

<1 %

KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2021

Publication

90

Fecky M. Pangemanan, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka. "PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENYUSUNAN APBDESA TALAWAAN KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019

Publication

<1 %

91

eprints.ums.ac.id
Internet Source

<1 %

92

eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

<1 %

93

etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

<1 %

94

repository.unj.ac.id
Internet Source

<1 %

95

Ahmad Riswantio, Hendri Tanjung, Abrista Devi. "Dampak Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Kesehatan dan Pendidikan Nasional", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021

<1 %

96

Anton Trianto. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2016

Publication

<1 %

97

Ayi Muhiban, Erwinda Karina Putri. "Pengaruh Tampilan Produk dan Electronic Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-commerce Shopee (Studi Kasus Konsumen Shopee di PT. Gucci Ratu Textile Kota Cimahi)", Jurnal EMT KITA, 2022

Publication

<1 %

98

Marya Ulfa Q, Haryadi Haryadi, Muhammad Gowon. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP FISCAL STRESS DI PROVINSI JAMBI", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2021

Publication

<1 %

99

Purweni Widhianningrum, Sasongko Aji. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PONOROGO", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2019

Publication

<1 %

100

Reza Rinova, Fajar Gustiawaty Dewi. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah

<1 %

Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Pada Daerah Pemekaran di Pulau
Sumatera)", Jurnal Akuntansi dan Keuangan,
2021

Publication

-
- 101 SARBOINI, Nurfiani SYAMSUDDIN, MARIATI,
M. Shiddiq Aulia JAMIL. "Pengaruh Kualitas
Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Loyalitas Pelanggan KFC di Kota Banda Aceh",
JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan
Akuntansi), 2022

Publication

-
- 102 Submitted to Yonkers High School

Student Paper

-
- 103 Yulianthy Ho, Suwandi Ng, Paulus Tangke.
"STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN
SEBAGAI MEKANISME PEMBENTUKAN
PRINSIP KONSERVATISME UNTUK
MENCIPTAKAN RESPON PASAR", SIMAK, 2019

Publication

-
- 104 docplayer.info

Internet Source

-
- 105 eprints.uny.ac.id

Internet Source

-
- 106 etd.iain-padangsidimpuan.ac.id

Internet Source

107	Internet Source	<1 %
108	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
109	www.viralntt.com Internet Source	<1 %
110	Azizah Azizah. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN DAN EFISIENSI BELANJA GUNA MENGUKUR KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AHMAD RIPIN KABUPATEN MUARO JAMBI PADA MASA PANDEMI COVID 19", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2022 Publication	<1 %
111	Dede Sevi, Sri Mulyati, Asep Kurniawan. "THE EFFECT OF KNOWLEDGE OF ETHICS, RELIGIOSITY, ETHICAL SENSITIVITY, ETHICAL ORIENTATION TO ACCOUNTING STUDENTS PERCEPTION OF CREATIVE ACCOUNTING PRACTICES", ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2021 Publication	<1 %
112	Nuri Andriyani, Mukhzarudfa, Enggar Diah PA. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 –	<1 %

113

Sineba Arli Silvia. "Pengaruh Kualitas Aset Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017

Publication

<1 %

114

Usman. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda", Jambura Accounting Review, 2022

Publication

<1 %

115

Agus Sukarno, Hadioetomo Hadioetomo, Agus Haryadi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2019

Publication

<1 %

116

Dwi Bambang Deswantoro, Asniar Ismail, Hendarmin Hendarmin. "Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2017

Publication

<1 %

117 Ferly Christian Kolinug, Anderson Guntur Kumenaung, Debby Christina Rotinsulu. "ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019
Publication <1 %

118 Submitted to Keimyung University
Student Paper <1 %

119 Muhammad Arfan Harahap, Muhammad Hafizh, Anjur Perkasa Alam. "Analisis Data Panel Pengaruh PDRB, BI Rate dan IPM Terhadap Tabungan Bank", Jurnal EMT KITA, 2021
Publication <1 %

120 repository.usd.ac.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

YOGAS ANDI PRIMA_18.1.02.01.0010

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134
